



JURNAL SEMARAK KABUMIAN

KEBUMEN SEJAHTERA MANDIRI BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- **Menakar Posisi Lembaga Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah**
- **Kajian Struktur Pasar dan Pola Distribusi Melalui Manajemen Rantai Pasok Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kabupaten Kebumen**
- **Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Srusuh Jurutengah**
- **Praktek Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal**
- **Pariwisata Kabumian Mewujudkan Wisata Lestari Berbasis Potensi lokal Kebumen**



ISSN :
Volume 1 Nomor 1

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

KETUA PENYUNTING

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

**Jinggarani Rosmala Dewi, S.IP, MPA
Eka Idham I.I.P.K Lewa, ST, MM
Kabul Trifiyanto, SE, MBA**

MITRA BESTARI

**H. Sarwono, M.Kes
Dr. Irfan Helmi, S.E, M.M
Sigit Triwibowo
Mukhsinun, S.H.I, M.E.I
Sotya Partiwidiwijoyo, M.M
Taukhid, SE
Ahmad Saifur Rohman**

SEKRETARIAT

**Timbul Purnomo Raharjo
Ita Purnamasari, S.Pd**

DESAIN GRAFIS

Zakiyal Fikri, S.T

DAFTAR ISI

Menakar Posisi Lembaga Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah

Bahrin Munawir 1-14

Kajian Struktur Pasar dan Pola Distribusi Melalui Manajemen Rantai Pasok Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kabupaten Kebumen

Rizal Taufik 15-32

Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Srusuh Jurutengah

Katon Lintang Ramadhan 33-43

Praktek Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal

Jinggarani Rosmala Dewi 44-51

Pariwisata Kabumian Mewujudkan Wisata Lestari Berbasis Potensi lokal Kebumen

Sigit Tri Prabowo,
Kezia Kristananda 52-60

PENGIRIMAN JURNAL

**BAPPEDA Kabupaten Kebumen
Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F
Kompleks Setda Kabupaten Kebumen 54311
Telepon (0287) 381570**

Menakar Posisi Lembaga Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

Measuring the Position of R&D Institutions in Formulating Regional Development Policies

Bahrin Munawir

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Jalan Merdeka No. 2, Gd. F Komplek Setda Kebumen 54311
Email: bahrin86@gmail.com

Naskah Masuk: 7 November 2022 Naskah Revisi: 27 Desember 2022 Naskah Diterima: 15 Februari 2023

ABSTRACT

Against the different views on the role of R&D and innovation in the formulation of regional development policies, this paper aims to find out how R&D takes on the role of being a local government academic institution "think tank" that actively examines factual phenomena and issues, so that qualitative research methods with a case study approach are more appropriate to provide new explanations and insights based on Dunn's Theory of Public Policy Analysis. This paper formulates several findings. First. The institutional R&D function that is integrated with the planning function at Bappeda is still relevant. Second, R&D tasks and functions also need to be expanded with research and innovation. Third, there are still limited human resources for carrying out the R&D function. Fourth, R&D support for development planning can be done in two ways, through the planning formulation process and through monitoring and evaluation of development planning. Fifth, 64.28% of respondents stated that the R&D Sector has taken on the role of a regional government academic institution "think tank" that actively examines factual phenomena and issues. Sixth, there are 44 research themes consisting of 16 themes of governance and public services, 10 social themes, 16 themes of economy and regional development, and 2 themes of innovation and science and technology. This paper can be used as input and material for consideration in the formation of BRIDA in Kebumen Regency.

Kata kunci : R&D, innovation, policy, regional development, think tank

ABSTRAK

Dilatarbelakangi perbedaan pandangan peran litbang dan inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah "think tank" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual, sehingga metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lebih tepat untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru dengan basis Teori Analisa Kebijakan Publik Dunn. Tulisan ini merumuskan beberapa temuan. Pertama. Kelembagaan fungsi litbang yang diintegrasikan dengan fungsi perencanaan di Bappeda masih relevan. Kedua, tugas dan fungsi kelitbangan juga perlu diperluas dengan riset dan inovasi. Ketiga, masih terbatasnya SDM pelaksana fungsi litbang. Keempat, dukungan litbang untuk perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua cara, melalui proses perumusan perencanaan dan melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan. Kelima, 64,28% responden menyatakan Bidang Litbang telah mengambil peran sebagai lembaga akademik pemerintah daerah "think tank" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual. Keenam, terdapat 44 tema penelitian yang terdiri dari 16 tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 10 tema sosial kemasyarakatan, 16 tema ekonomi dan pembangunan daerah, dan 2 tema inovasi dan iptek. Tulisan ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembentukan BRIDA di Kabupaten Kebumen.

Kata kunci : R&D, inovasi, kebijakan, pembangunan daerah, think tank

PENDAHULUAN

Birokrasi memegang peranan kunci dan mempunyai kedudukan strategis dalam proses pembangunan (Irfan, 2020), apalagi di masa perubahan yang begitu cepat, tidak menentu dan beragam, organisasi sektor publik dituntut responsif dan fleksibel (Situmorang, 2021).

Namun dalam prakteknya, birokrasi terkadang mengalami kegagalan dalam merespon permasalahan pembangunan, salah satunya disebabkan perumusan kebijakan yang belum didasarkan penelitian. Penelitian yang ada masih kurang kuat, kurang akurat dan kurang lengkap sebelum pengambilan kebijakan (Setiadi et al., 2021).

Birokrasi juga melihat penelitian dan pengembangan sebatas diskusi, monoton dan tidak aplikatif, sehingga hasil kelitbangan tidak serta merta bisa dijadikan basis perencanaan pembangunan (Saksono, 2019). Akhirnya kesan yang muncul, litbang hanya untuk menghabiskan anggaran (Yazul et al., 2019).

Penelitian Sarpong et al., (2022) mengemukakan investasi dalam penelitian dan pengembangan hanya akan menghasilkan lebih banyak makalah dan meningkatkan penggunaan teknologi secara bertahap tetapi tidak akan menghasilkan inovasi yang radikal dan mendorong pertumbuhan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi material masyarakat.

Walaupun demikian, para peneliti telah lama mengakui dan menganjurkan investasi dalam penelitian dan pengembangan tetap penting untuk membuka inovasi yang lebih canggih dan berkelanjutan (Ganda, 2019; Xu et al., 2021; Holt et al., 2021).

Memperhatikan kajian penelitian sebelumnya, sebagian besar belum mengkaji secara komprehensif aspek lain yang menggambarkan pembangunan daerah berbasis hasil kelitbangan serta bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah "*think tank*" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual.

Sehubungan hal tersebut setidaknya tulisan ini berusaha memberikan enam kontribusi. Pertama, tulisan ini menggambarkan transformasi kelembagaan pengampu urusan litbang dari masa ke masa. Kedua, menjelaskan tugas dan fungsi organisasi kelitbangan dan hubungannya dengan tugas dan fungsi BRIDA. Ketiga, menggambarkan ketersediaan sumber

daya manusia aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi kelitbangan. Keempat, mengungkap kolaborasi hubungan antara Bidang Litbang dengan Bidang Lainnya dalam perspektif Teori Kebijakan Publik yaitu dengan model sinergi penelitian, pengembangan, dan perencanaan untuk menghasilkan perencanaan berbasis kelitbangan. Kelima, mengungkap persepsi stakeholder terhadap peran lembaga litbang dalam pembangunan. Keenam, mengungkap tema-tema usulan penelitian dan pengembangan yang diharapkan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi penelitian dan pengembangan

Para pakar dan/atau institusi telah banyak mendefinisikan pengertian penelitian dan pengembangan berdasarkan bidang keilmuan masing-masing yang berbeda, (Saputro, 2017) merangkumnya sebagai berikut: Borg & Gall mendefinisikannya sebagai tahapan yang dilakukan untuk pengembangan dan pengecekan produk tertentu, Sukmadinata, penciptaan produk baru atau peningkatan produk sebelumnya, Sugiyono sebagai proses membuat produk dan menguji efektivitasnya.

Penggunaan istilah litbang (R&D) dan inovasi masih menjadi perdebatan, sering kali digunakan bergantian dengan makna yang serupa, disisi lain ada pula yang secara tegas membedakannya. Inovasi dibedakan dari penelitian dan pengembangan (R&D) oleh fakta bahwa R&D mengubah uang menjadi pengetahuan sedangkan inovasi mengubah pengetahuan menjadi peluang komersial (Brussels, 2021).

Dalam tulisan ini, konsep Penelitian dan Pengembangan (R&D) dan inovasi digunakan secara bergantian dengan mengacu pada temuan (Koilo, 2021) bahwa inovasi dianggap dibangun di atas R&D, dan kedua istilah tersebut memainkan peran yang sama dalam menghasilkan omset dari inovasi produk, sehingga menciptakan bentuk nilai tambah baru.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah

Organisasi R&D dapat berbentuk organisasi independen atau tergabung dalam instansi pemerintah, pemda, universitas, swasta, NGO atau ormas. (Gunawan & Winarno, 2017). Dalam artikel ini, penulis memfokuskan

perhatian pada organisasi yang menjadi bagian dari organisasi pemerintah daerah.

Organisasi Perangkat Daerah dikelompokkan menurut konsepsi *Five Basic Parts of The Organization* (Mintzberg & Quinn, 1996) sebagaimana termaktub pada penjelasan PP No. 18 Tahun 2016 yaitu mencakup 5 bentuk, yaitu Bupati/Walikota sebagai *strategic apex* dan sekda sebagai *middle line*, selanjutnya *operating core* diwujudkan dalam bentuk dinas, *technostructure* dalam bentuk badan, dan *supporting staff* dalam bentuk staf pendukung. *Kelembagaan OPD Litbang: perspektif legal normatif*

UU No. 23 Tahun 2014 pasal 219 menyebutkan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan meliputi perencanaan, kepegawaian dan diklat, keuangan, litbang serta fungsi lainnya sesuai perundangan. Sehingga pembentukan badan tersebut *conditio sine qua non by law*, atau wajib dibentuk dalam pemerintahan daerah atas dasar undang-undang (Narutomo, 2017).

Badan dapat mengampu 2 urusan penunjang dalam hal fungsi penunjang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk tersendiri, penggabungan tersebut didasarkan pada kedekatan fungsi serta hubungannya dalam penyelenggaraan. Urusan yang dapat dirumpunkan diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016 yaitu kepegawaian dan diklat; serta perencanaan dan litbang.

Terbitnya Perpres No. 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan pembentukan BRIN dan BRIDA menjadi topik hangat dan magnet baru pembahasan lembaga kelitbang. Hal ini dipicu pengalihan tuis, kewenangan seluruh unit kerja litbang dan penerapan iptek di lingkungan K/L menjadi tuis dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Akibatnya, Kemendagri menghapus BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Di Level daerah, pemerintah daerah juga dapat membentuk BRIDA sesuai ketentuan Pasal 66 Perpres tersebut.

Peranan R&D dalam pembangunan daerah

Tugas OPD litbang diatur melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, yaitu meneliti, mengembangkan, mengkaji, menerapkan, merekayasa, mengoperasikan, dan mengevaluasi kebijakan.

Selain tugas utama tersebut, (Nurjaman & Antonius, 2018) R&D juga memiliki tugas mengembangkan dan menyebarluaskan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan penemu kepada pengguna, dari sektor industri atau masyarakat.

Beberapa penelitian mengemukakan peran R&D dalam pembangunan daerah, yaitu menciptakan proxy, format dan opsi keputusan yang dapat diambil pembuat kebijakan untuk perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan dan pemantauan. (Roni, 2016), memainkan peranan dalam pengelolaan inovasi daerah secara maksimal (Arifin & Sakti, 2017), perumusan dan penyusunan (formulasi) kebijakan pemerintah daerah yang berbasis *knowledge and evidence based policy* atau *research based policy* (Narutomo, 2017; Saksono, 2021), dan menjadi pendukung utama *policy making* serta percepatan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (Sampurna & Irwandi, 2017).

Theoretical Basis: Analisis Kebijakan Publik Dunn

Proses pembuatan kebijakan disajikan secara kronologis dalam rangkaian fase yang saling terhubung satu sama lain: penetapan agenda, perumusan, adopsi, implementasi dan penilaian kebijakan (Dunn, 2018).

Proses ini berkaitan erat dengan proses analisis kebijakan pada setiap tahapan, dan penerapan analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pengembangan kebijakan dan kinerjanya.

Proses ini berkaitan erat dengan proses analisis kebijakan pada setiap tahapan, dan implementasi analisis kebijakan bisa meningkatkan tahapan pengembangan kebijakan dan performanya.

Gambar 1

Keterkaitan Prosedur Analisis dan Proses Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, (2018)

Perumusan masalah memaparkan asumsi yang melatarbelakangi, mengkaji penyebab, menggambarkan kemungkinan tujuan, menggabungkan perbedaan pandangan, dan menguraikan opsi kebijakan baru melalui penetapan agenda. Peramalan menyajikan informasi tentang kemungkinan masa depan ketika alternatif dipilih, termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, mengevaluasi hasil dari strategi lama dan baru, serta menganalisa potensi hambatan dalam mencapai tujuan. Hal ini terjadi selama tahap formulasi kebijakan.

Rekomendasi menginformasikan benefit atau kebutuhan pembiayaan dari berbagai opsi, di mana dampaknya di masa depan telah diekstrapolasi melalui proyeksi. Tahap ini membantu dalam tahap adopsi kebijakan.

Pemantauan membantu mengetahui derajat kepatuhan, merumuskan konsekuensi permasalahan suatu program, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan serta mengetahui siapa penyebabnya. Fase ini membantu di tahap implementasi kebijakan.

Evaluasi memperlihatkan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kondisi aktual, tahap ini mendukung pada fase evaluasi kebijakan.

terlebih dahulu memantaunya. Demikian pula, analisis dapat memantau hasil kebijakan tanpa mengevaluasinya, tetapi tidak mungkin mengevaluasi hasil tanpa sebelumnya memantau keberadaan dan besarnya suatu hasil. Akhirnya, untuk memilih kebijakan yang disukai biasanya mengharuskan analisis telah memantau, mengevaluasi, dan memperkirakan hasil.

Dalam hubungan antara pembuatan kebijakan dengan peran penelitian dan pengembangan, Fatoni, (2020) mengemukakan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan memainkan peran utama dalam tahap penetapan agenda. Partisipasi dalam tahap penyusunan agenda dapat membuka peluang untuk terlibat dalam desain kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah “*think tank*” yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lebih tepat untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru. Fiantika et al., (2022) mengutip pendapat Crowe bahwa studi kasus mampu menunjukkan “bagaimana suatu kondisi terjadi?”, “apa yang sedang terjadi?”, dan “mengapa dapat terjadi?”.

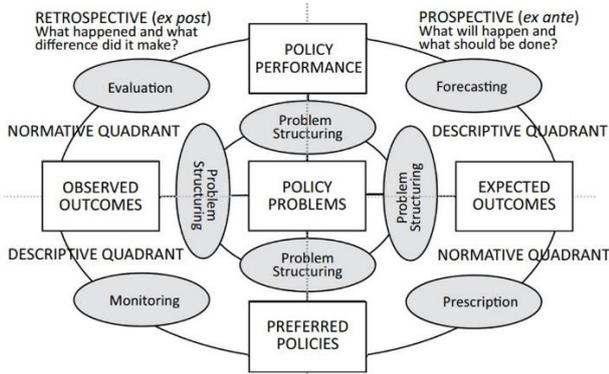
Pemilihan topik dengan penelusuran tulisan ilmiah pada *google scholar* dan *researchgate* dengan kata kunci “*Research and Development, Think Tank, Public Policy*”. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, kuesioner dan analisis dokumen yang relevan. Observasi dilakukan di Bappeda Kabupaten Kebumen, kuesioner dibagikan secara *online* kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Analisis dokumen dengan membuat *coding* hasil *literature review* dan peraturan perundangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Kelembagaan Organisasi Litbang dari Masa ke Masa

Urusan penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kebumen diwadahi ke dalam Bappeda, digabung dengan urusan perencanaan, sehingga menjadi Tipe A yang

Gambar 2
Bentuk Proses Analisa Kebijakan yang berorientasi masalah



Sumber : Dunn, (2018)

Lebih lanjut Dunn, (2018) menyampaikan bahwa metode analisis kebijakan saling bergantung. Tidak mungkin menggunakan satu metode tanpa menggunakan yang lain. Jadi, meskipun dimungkinkan untuk memantau kebijakan masa lalu tanpa meramalkan konsekuensinya di masa depan, biasanya tidak mungkin untuk meramalkan kebijakan tanpa

pembentukannya diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2021.

Latar belakang penggabungan litbang dan perencanaan dijelaskan pada klausul menimbang Perbup No. 127 Tahun 2021 yaitu mendukung kebijakan reformasi birokrasi berupa penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah.

Sebagai Badan Tipe A, kelembagaan Bappeda Kebumen meliputi Kepala Badan, Sekretariat, dan 4 Bidang, yaitu:

- a. Bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
- b. Bidang PSDAI (Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur)

c. Bidang Pendalev (Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

d. Bidang Litbang (Penelitian & Pengembangan).

Urusan litbang saat ini diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sebelumnya, lembaga yang mewadahi urusan litbang telah berubah-ubah mengikuti perkembangan aturan dan kebutuhan daerah, dari berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Subbidang, Subkordinator maupun Bidang. Hasil observasi penulis, ditemukan beberapa dokumen perbup yang membahas tentang keberadaan organisasi litbang di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1.

Perkembangan Bentuk Organisasi Litbang di Kabupaten Kebumen

No.	Tahun	Bentuk Organisasi
1.	1987 – 2004	Bidang Pendataan dan Pelaporan (Perda No. 5 Tahun 1987)
2.	2004 – 2008	Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan (Perda No. 32 Tahun 2004)
3.	2008 – 2016	Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian (Perbup No. 80 Tahun 2008)
4.	2016 – 2019	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 82 Tahun 2016)
5.	2019 – 2021	Subbidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 74 Tahun 2019)
6.	2021 – 2021	Subkordinator Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 96 Tahun 2021)
7.	2022 – sekarang	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 127 Tahun 2021)

Sumber: data diolah dari <https://jdih.kebumenkab.go.id/>

Selama kurun waktu tersebut, urusan litbang selalu diampu Bappeda, digabungkan dengan urusan perencanaan. Penggabungan ini selain didasarkan pada kebijakan penyederhanaan birokrasi juga memperhatikan kedekatan tugas dan fungsinya.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut mewarnai perkembangan kelembagaan litbang, UU ini menjawab kebutuhan pembentukan kelembagaan riset dan inovasi daerah dalam pasal 121 yang merubah Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

(2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang

terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Mencermati Pasal 121 UU Cipta Kerja yang mengamanahkan adanya pembentukan BRIDA, haruslah dipandang Pemda sebagai suatu kewajiban membentuk BRIDA, baik pembentukan baru ataupun melalui integrasi, dengan cara pembentukan disebutkan oleh Perpres 78 Tahun 2021 “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ini menunjukkan bahwa pembentukan BRIDA tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti Perpres ini dengan menerbitkan Surat No. 120/5434/SJ Tanggal 12 September 2022 Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Surat tersebut menjelaskan arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, dimana unsur litbang disesuaikan untuk diwadahi dalam bentuk BRIDA sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Bappeda dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal digabung dengan Bappeda nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Pembentukan dan susunan BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BRIN.

Mengacu surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan

pengintegrasian BRIDA merupakan suatu keharusan, bukan pilihan untuk membentuk atau tidak membentuk, yang menjadi pilihan adalah skema pembentukannya, dapat berbentuk OPD tersendiri, atau di integrasikan dengan Bappeda.

Alternatif skema pembentukan baik yang berdiri sendiri atau diintegrasikan memiliki konsekuensi lanjutan. Apabila terjadi perubahan nama menjadi BRIDA maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah, sedangkan jika perluasan fungsi dengan memperkaya urusan di bidang riset dan inovasi, hanya perlu mengubah peraturan bupati tentang SOTK OPD.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Litbang

Saat ini Bidang Litbang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi. Dengan diterbitkannya Perpres 78 Tahun 2021 tentunya akan mengakibatkan beberapa penyesuaian terhadap tugas dan fungsi kelitbangan.

Tabel 2.

Perbandingan Tugas dan Fungsi Bidang Litbang pada Bappeda Kebumen dan BRIDA

No.	Perbup 127 Tahun 2021	Perpres 78 Tahun 2021
A.	Tugas: melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tugas: BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
B.	Fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah; b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan Daerah; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah; e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi dan	Fungsi: a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

No.	Perbup 127 Tahun 2021	Perpres 78 Tahun 2021
	<p>teknologi Daerah;</p> <p>f. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;</p> <p>g. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>j. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang Daerah;</p> <p>k. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan Daerah;</p> <p>l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan</p> <p>m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>	<p>b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;</p> <p>c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,</p> <p>f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;</p> <p>g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan</p> <p>h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.</p>

Sumber : Perpres 78 Tahun 2021 dan Perbup 127 Tahun 2021

Perbedaan tugas dan fungsi di atas menunjukkan bahwa Bidang Litbang pada Bappeda masih relevan dengan BRIDA, dimana litbang (termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan “kualitas kebijakan dan program” penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekuensinya litbang dituntut sekaligus untuk membantu memikirkan dan

merealisasikan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) demi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah.

Pembagian tugas dan fungsi di Bidang Litbang idealnya mendasari pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 yaitu dengan membagi ke dalam 2 Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Sub

Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan badan usaha milik desa, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, badan usaha milik Daerah, otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset Daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyiapkan penelitian dan pengembangan pada bidang pembangunan, inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Litbang

Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Litbang berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 1 orang analis kebijakan, 1 orang fungsional perencana, 1 orang pengadministrasi umum dan 2 orang tenaga harian lepas yang mengisi posisi analis litbang. Saat ini belum tersedia fungsional peneliti dan perekayasa.

Tabel 3.

Kondisi SDM Aparatur Bidang Litbang

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Bidang	1
2	Analisis Kebijakan	1
3	Fungsional Perencana	1
4	Pengadministrasi Umum	1

5	Analisis Penelitian dan Pengembangan	2
---	--------------------------------------	---

Jumlah		6
--------	--	---

Sumber : Bidang Litbang, 2022

Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar sudah mengenyam pendidikan sarjana dengan bidang jurusan yang berbeda.

Tabel 4.

Jenjang Pendidikan SDM Bidang Litbang

No	SDM	Pendidikan
1	Kepala Bidang	S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah
2	Analisis Kebijakan	S2 Magister Administrasi Publik
3	Fungsional Perencana	S2 Magister Manajemen
4	Pengadministrasi Umum	SMA
5	Analisis Litbang	S1 Pendidikan Fisika
6	Analisis Litbang	S1 Komputer

Sumber : Bidang Litbang, 2022

4. Kolaborasi hubungan antara Bidang Litbang dengan Bidang Lainnya dalam perspektif Teori Kebijakan Publik

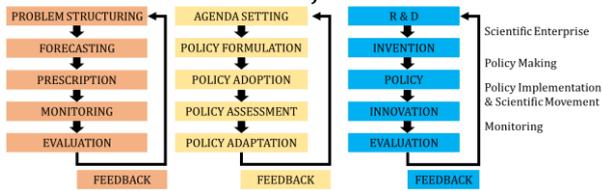
Dalam Peta Proses Bisnis Bappeda Kebumen, Bidang Litbang mengampu proses utama “meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan”.

Bidang Litbang memberikan data dan informasi yang digunakan oleh Bidang Perencanaan guna mencapai sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan *theoretical basic* yang digunakan pada tulisan ini, ada kedekatan hubungan antara prosedur dan proses analisis kebijakan publik. Pertanyaannya adalah dimana posisi kelitbang dalam rangka meningkatkan “kualitas kebijakan dan program” penyelenggaraan pemerintahan daerah?.

Gambar 3.

Posisi Litbang dalam Prosedur dan Proses Analisis Kebijakan Publik



Sumber : Dikembangkan dari Teori Dunn, 2022

Proses R&D setara dengan *problem structuring* dan *agenda setting*. Proses ini menguraikan akar serabut permasalahan berdasarkan *feedback*, analisa data dan hasil monitoring dan evaluasi, menggambarkan kemungkinan tujuan, mensinergikan perbedaan pandangan, dan memberikan opsi kebijakan baru melalui *agenda setting*.

Tahapan *Invention* berhubungan dengan *forecasting* dan *policy formulation*. Hasil R&D menjadi alternatif pilihan kebijakan yang bisa diambil berdasarkan *forecasting* kemungkinan masa depan ketika alternatif dipilih, evaluasi dari strategi lama dan baru, serta analisa potensi hambatan dalam mencapai tujuan dalam tahap *policy formulation*.

Tahapan *Policy* berhubungan dengan tahap *prescription* dan *policy adoption*. *Prescription* menginformasikan benefit atas berbagai opsi, di mana dampaknya di masa depan telah diekstrapolasi melalui proyeksi dalam tahap *policy adoption*. Dalam tahap ini juga dilakukan *scientific movement*, untuk nantinya dihasilkan *innovation*.

Tahapan *Innovation* berhubungan dengan *monitoring* dan *policy assessment*. Pemantauan untuk mengetahui derajat kepatuhan, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan. *Innovation* hasil *scientific movement* akan membantu tahap implementasi kebijakan menjadi lebih baik karena telah mengadopsi hasil R&D.

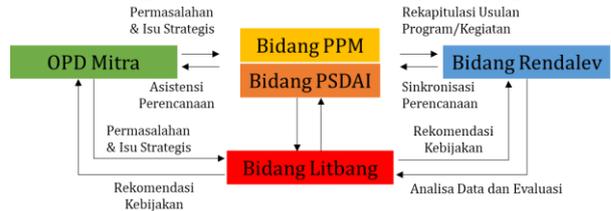
Tahapan *Evaluation*, berhubungan dengan tahap *evaluation* dan *policy adaptation*. Evaluasi memperlihatkan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kondisi aktual, tahap ini mendukung pada fase *evaluation*. Dalam tahap ini juga dapat dilakukan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi termasuk kesesuaian dengan hasil inovasi.

Dalam tataran teknis, Bidang Litbang melakukan inventarisasi permasalahan di OPD

baik meminta secara langsung dari OPD atau melalui bidang-bidang di Bappeda. Selanjutnya Litbang memberikan rekomendasi bagi bidang lainnya di Bappeda sebagai bahan untuk mengarahkan kegiatan di mitra OPD masing-masing bidang.

Gambar 4.

Hubungan Kerja antar Bidang di Bappeda



Sumber : Penulis, 2022

Dukungan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan saat ini dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui proses perumusan perencanaan, kedua melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Perumusan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) serta perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), Bidang Litbang dapat memberikan masukan terhadap kebijakan/peraturan/rekomendasi program berdasarkan hasil litbang serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis.

Selanjutnya hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bidang-bidang di Bappeda serta hasil evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah oleh OPD Mitra berupa permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dapat dijadikan bahan analisis permasalahan dan isu-isu strategis untuk pembangunan daerah serta rencana penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

Selain itu, Bidang Litbang juga mengevaluasi kebijakan pembangunan (pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan program pembangunan). Outputnya berupa usulan kebijakan/rekomendasi kebijakan, baik untuk RPJMD, RKPD, maupun Renstra, Renja OPD. Analisis masalah dan isu strategis pembangunan daerah merupakan masukan rekomendasi bagi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan SKPD sektor. Diharapkan hubungan timbal balik ini dapat

menciptakan sinergi antara fungsi litbang dan perencanaan di lingkungan Bappeda.

Kolaborasi antara urusan Litbang dengan urusan Perencanaan secara utuh diharapkan dapat mewujudkan Bappeda sebagai *think thank* yang dapat memberikan arah bagi penyusunan perencanaan di OPD sehingga akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dapat terealisasi.

5. Persepsi Stakeholder terhadap Peran Penelitian dan Pengembangan

Penentuan informan bersifat terbuka melalui pembagian kuesioner secara *online*. Hasilnya diperoleh 28 informan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, wiraswasta/ pelaku usaha, perguruan tinggi dan media.

Tabel 5.

Jumlah Informan berdasarkan Unsur

Unsur	Σ	%
Pemerintah	10	35,71
Masyarakat	6	21,43
Wiraswasta/Pelaku Usaha	5	17,86
Perguruan Tinggi	6	21,43
Media	1	3,57
Jumlah	28	100

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari sisi keterwakilan unsur pentahelix, informan belum merata sebarannya, jumlah terbanyak yang mengisi kuesioner masih didominasi unsur pemerintah yaitu sejumlah 10 orang atau 35,71%. Yang paling sedikit berasal dari unsur media yaitu hanya seorang atau 3,57%. Sedangkan unsur masyarakat, wiraswasta dan perguruan tinggi relatif merata yaitu kisaran 5-6 orang.

Terhadap 6 pertanyaan yang disampaikan kepada informan, ditemukan beberapa temuan penelitian yaitu: Pertama, 60,72% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan prediktif untuk jangka menengah/panjang.

Tabel 6.

Frekuensi Bidang Litbang mengidentifikasi permasalahan

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	17	60,72
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	2	7,14

Tidak Tahu	2	7,14
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Kedua, 67,86% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan pertimbangan teknis untuk pengambilan langkah dan kebijakan strategis jangka pendek/segera.

Tabel 7.

Frekuensi Bidang Litbang memberikan pertimbangan teknis

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	19	67,86
Jarang dilakukan	6	21,43
Belum dilakukan	2	7,14
Tidak Tahu	1	3,57
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Ketiga, 71,43% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan dorongan penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 8.

Frekuensi Bidang Litbang mendorong penguatan dan penciptaan inovasi

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	20	71,43
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	1	3,57
Tidak Tahu	0	0
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Keempat, 67,86% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan penguatan jejaring Kerjasama antar Lembaga litbang, perguruan tinggi, media dan Lembaga lainnya baik dalam aspek substansi pelaksanaan kelitbangan, penguatan SDM, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.

Tabel 9.

Frekuensi Bidang Litbang Memperkuat jejaring Kerjasama

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	19	67,86
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	2	7,14
Tidak Tahu	0	0
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Kelima, 53,57% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan penyediaan fasilitas pendukung kelitbangan seperti database litbang daerah, etalase inovasi daerah, publikasi kelitbangan melalui website, jurnal atau media sosial.

Tabel 10.

Frekuensi Bidang Litbang Menyediakan fasilitas pendukung kelitbangan

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	15	53,57
Jarang dilakukan	8	28,57
Belum dilakukan	4	14,29
Tidak Tahu	1	3,57
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Keenam, berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan, tema-tema untuk diteliti, dikembangkan ataupun dikaji untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Integrasi perencanaan dan penganggaran
2. Digitalisasi data/Informasi Daerah
3. Evaluasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pembangunan
4. Pengembangan sistem capaian kinerja keuangan
5. Tata naskah dan arsip digital dan non digital
6. Perencanaan pembangunan daerah
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
8. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
9. Keamanan informasi
10. Kajian strategi peningkatan pelayanan publik
11. Penataan administrasi kependudukan
12. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
13. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
14. Pembinaan dan pengembangan aparatur
15. Pendidikan kedinasan
16. Gerakan Anti Korupsi

B. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

1. Pemberdayaan lembaga keagamaan untuk menunjang kesejahteraan sosial
2. Pengarusutamaan akhlak mulia pada tatanan masyarakat

3. Peningkatan Literasi Masyarakat
4. Pemeliharaan kantrantibum dan pencegahan tindak kriminal
5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
7. Peningkatan Pelayanan RS Jiwa
8. Peningkatan Pelayanan Jiwa Komunitas di Puskesmas
9. Aksesibilitas layanan pendidikan bagi kelompok khusus
10. Dukungan terhadap kelompok khusus yang terlibat penyalahgunaan narkoba / kelompok HIVAIDS/ LGBT

C. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

1. Monitoring, evaluasi dan Perencanaan pengembangan teknik pertanian, teknologi hasil pertanian dan tata niaga dari masing-masing produk lokal
2. Perencanaan transportasi pendukung agrobisnis
3. Pemasaran hasil pertanian baik lokal, regional, nasional maupun skala ekspor
4. Perencanaan corporate farming yang efektif di Kab Kebumen, untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
5. Perencanaan pelibatan aktif masyarakat di bidang Agrobisnis baik itu on farm maupun off farm serta potensi milenial sebagai pengelola atau pendamping usaha pertanian berbasis korporasi (lokasi, jenis komoditas, teknik pertanian dan THP)
6. Kajian tentang Agroklimatologi Kabupaten kebumen
7. Peningkatan kualitas lembaga pemberdayaan masyarakat pertanian (Kelompok Tani, Kelompok Ternak, GAPOKTAN dan asosiasi pertanian lainnya) kolaborasi dengan kemitraan di bidang pemasaran produk dan pembiayaan usaha pertanian
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
9. Pengembangan konsep perikanan berkelanjutan
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan wisata
11. Pengembangan destinasi pariwisata baru

12. Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa
 13. Infrastruktur pendukung pariwisata
 14. Pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda dalam meningkatkan daya saing
 15. Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
 16. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
- D. Bidang Inovasi dan IPTEK
1. Implementasi Inovasi Perguruan Tinggi pada Masyarakat
 2. Perencanaan technopark

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, literature review, analisa isian kuesioner, tulisan ini menyimpulkan beberapa temuan. Pertama. Kelembagaan fungsi litbang yang diintegrasikan dengan fungsi perencanaan di Bappeda masih relevan. Kedua, tugas dan fungsi kelitbang juga perlu diperluas dengan riset dan inovasi. Ketiga, masih terbatasnya SDM pelaksana fungsi litbang. Keempat, dukungan litbang untuk perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua cara, melalui proses perumusan perencanaan dan melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan. Kelima, 64,28% informan menyatakan Bidang Litbang telah mengambil peran sebagai lembaga akademik pemerintah daerah "*think tank*" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual. Keenam, terdapat 44 tema penelitian yang terdiri dari 16 tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 10 tema sosial kemasyarakatan, 16 tema ekonomi dan pembangunan daerah, dan 2 tema inovasi dan iptek.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberikan saran tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan BRIDA di Kabupaten Kebumen kiranya dilakukan dengan skema integrasi ke Bappeda yaitu dengan menggabungkan dengan fungsi penelitian dan pengembangan dalam bentuk bidang. Sebagai tahap awal kiranya dilakukan penyesuaian nama Bidang Penelitian dan

Pengembangan menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, tahap ini membawa konsekuensi perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Tahap selanjutnya untuk nomenklatur kelembagaan Bappeda dapat disesuaikan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau nomenklatur lain yang nantinya akan diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur Bappeda. Tahap ini berdampak pada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021.

2. Perluasan fungsi litbang dengan riset dan inovasi kiranya mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.
3. Terhadap kondisi SDM Aparatur Bidang Litbang yang masih terbatas, terlebih lagi belum adanya fungsional peneliti kiranya menjadi perhatian untuk penambahan personil baik melalui pengadaan CPNS/PPPK atau melalui alih jalur.
4. Terhadap dukungan litbang dalam perencanaan pembangunan kiranya dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Litbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*).
5. Terhadap persepsi peran litbang sebagai *think tank*, khususnya pada penyediaan fasilitas pendukung kelitbang kiranya dapat dioptimalkan melalui pengembangan database litbang daerah, etalase inovasi daerah, publikasi kelitbang melalui website, jurnal dan media sosial.
6. Terhadap 44 tema penelitian di Tahun 2023 sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Kelitbang kiranya dapat

ditempuh melalui optimalisasi jejaring kelitbangan daerah, khususnya perguruan tinggi untuk bisa menangkap peluang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *University Research Colloquium*, 1, 61–72.
- Brussels. (2021). *Nine types of innovation entrepreneurs should know about*. <https://1819.brussels/en/information-library/rd-innovation-partnerships/9-types-innovation-for-companies>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. In *Routledge New York and London*.
- Fatonie, I. (2020). The role of Indonesian Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance. *Journal of Asian Public Policy*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1829354>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Issue March, pp. 54–68). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ganda, F. (2019). The impact of innovation and technology investments on carbon emissions in selected organisation for economic Co-operation and development countries. *Journal of Cleaner Production*, 217, 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.235>
- Gunawan, & Winarno, E. (2017). Refleksi terhadap wacana proses kebijakan berbasis riset. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, N, 157–178.
- Holt, J., Skali, A., & Thomson, R. (2021). The additionality of R&D tax policy: Quasi-experimental evidence. *Technovation*, 107(April), 102293. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102293>
- Irfan, M. (2020). Mewujudkan Sistem Perencanaan Suksesi Nasional Melalui Pembangunan Manajemen Talenta Di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Civil Service Journal*, 14(1), 55–68.
- Koilo, V. (2021). Evaluation of R&D activities in the maritime industry: Managing sustainability transitions through business model. *Problems and Perspectives in Management*, 19(3), 230–246. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(3\).2021.20](https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.20)
- Mintzberg, H., & Quinn, J. B. (1996). The Structuring of Organisations. *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases*, 331.
- Narutomo, T. (2017). Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 12(1).
- Nurjaman, R., & Antonius, P. G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 35–52.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (2016).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, (2008).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

- Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemba-ngunan Kabupaten Kebumen, (2004).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (2021).
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, (1987).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). *Peraturan Presiden*, 106885, 1-34. <https://jdih.batan.go.id/index.php?p=51&n=518&k=2021 Perpres>
- Roni, H. (2016). Penelitian dan Pengembangan, serta Peranannya Terhadap Daerah. *Media BPP Volume 1 No. 2 / Juni 2016 1, 1(2)*.
- Saksono, H. (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan dan Desain & Inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 213-226.
- Saksono, H. (2021). BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah BRIDA: The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Governmen. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20, 178-196. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.290>
- Sampurna, R. H., & Irwandi, N. (2017). Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Di Kabupaten Bandung. *Jispo*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1731>
- Saputro, B. (2017). *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis dan Disertasi* (Cetakan 1). Aswaja Pressindo. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_PENELITIAN_PENGEMBANGAN_RESEAR/O2nsDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Sarpong, D., Boakye, D., Ofosu, G., & Botchie, D. (2022). The three pointers of research and development (R&D) for growth-boosting sustainable innovation system. *Technovation*, 102581. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102581>
- Setiadi, R., Yesiana, R., Mardiansjah, F. H., & Putri, S. N. A. K. (2021). Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wlayah Kota Semarang 2021-2026. *Jurnal Riptek Vo. 15 No. 2 (19-27)*, 2(2), 19-27.
- Situmorang, C. H. (2021). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 317. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.699>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Xu, J., Wang, X., & Liu, F. (2021). Government subsidies, R&D investment and innovation performance: analysis from pharmaceutical sector in China. *Technology Analysis and Strategic Management*, 33(5), 535-553. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1830055>
- Yazul, M. A., Ali, Y., & Fahri, M. (2019). Strategi Bagian Penelitian dan Pengembangan dalam Meningkatkan Kualitas Produk Hasil Litbang yang Bermanfaat Bagi TNI Angkatan Darat (Studi di DITPALAD). *Jurnal Strategi Pertahanan Darat, Volume 5 N, 21-42*.
- Biodata Penulis : Bahrnun Munawir, lahir pada tanggal 25 Agustus 1986 di Kabupaten Kebumen. Bekerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Kajian Struktur Pasar Dan Pola Distribusi Melalui Manajemen Rantai Pasok Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kabupaten Kebumen

Market Structure Analysis and Supply Chain Management of Community Basic Needs in the Kebumen Regency

¹Muhammad Rizal Taufikurohman, ²Irene Kartika Eka, ²Ardiansyah, ²Indah Setiawati

¹Universitas Trilogi, Jakarta

²Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Email: mrizalt@trilogi.ac.id

Naskah Masuk: 8 November 2022

Naskah Revisi: 12 Januari 2023

Naskah Diterima: 15 Februari 2023

ABSTRACT

Basic necessities for the community (Kepokmas) are goods connected to the population's purchasing power at the lowest economic level. In order to control kepokmas prices in Kebumen Regency, this study will map commodity prices, determine the capacity and volume of commodity production, identify market structures and commodity distribution channels, analyze the limitations and causes of commodity price fluctuations, and recommend appropriate policy changes. Both primary and secondary data were used. Primary data collected through surveys of farmers in several production hubs, merchants in four major markets, and consumers in various market and housing areas. Surveys of a number of relevant organizations and reliable data sources in the Kebumen Regency were done to gather secondary data. The analytical approach used includes policy analysis, production analysis, supply chain management, descriptive analysis and market structure detection. The findings indicated that the eight kepokmas displayed wide and shifting price ranges. The market structure and distribution channels can be used to identify the reasons for price changes. Because there are oligopoly market practices at the wholesaler level or at the upstream level (farmers/breeders), the results of the food balance show that shallots, garlic, and granulated sugar are commodities that are highly dependent on availability from outside Kebumen. In order to reduce price disparities, it is necessary to regularly control and monitor the price of the community's basic needs.

Keywords: *Kepokmas, Market Structure, Distribution Pattern, Supply Chain Management (SCM), Price Stabilization, Policy Analysis*

Abstrak

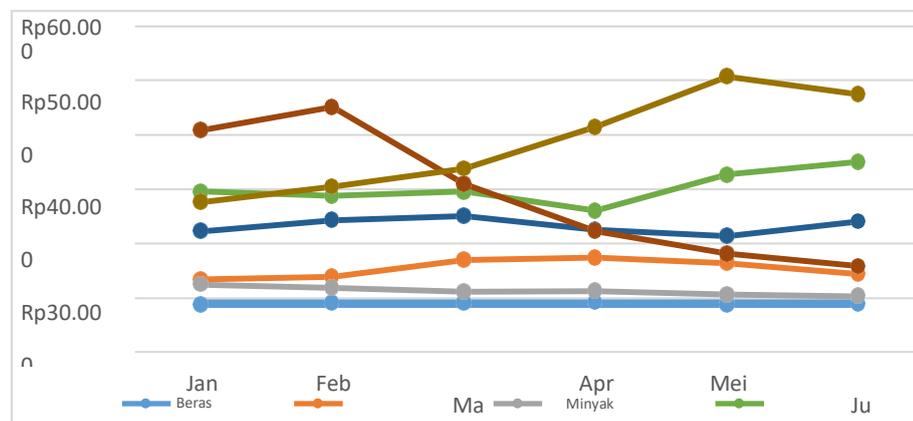
Kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) merupakan komoditas yang berkaitan dengan daya beli penduduk hingga ke level ekonomi terendah. Penelitian ini bertujuan untuk : melakukan pemetaan harga komoditas, mengetahui kapasitas dan jumlah produksi komoditas, mengidentifikasi struktur pasar dan jalur distribusi komoditas, menganalisis kendala dan penyebab terjadinya fluktuasi harga pada komoditas, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengendalian harga kepokmas di Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer di dapat dari survey petani di beberapa sentra produksi, pedagang di 4 pasar besar, dan konsumen di beberapa lokasi pasar dan perumahan. Data sekunder dilakukan survey pada beberapa instansi terkait dan sumber data yang mempunyai legitimasi di Kabupaten Kebumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan deteksi struktur pasar, analisis produksi dan *supply chain management*, *asymmetric transmission price*, dan *policy analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan kepokmas menunjukkan jarak harga yang besar dan fluktuatif. Penyebab fluktuasi harga dapat dilihat dari Struktur pasar dan Jalur distribusinya. Hasil neraca pangan menunjukkan bahwa komoditas bawang merah, bawang putih, dan gula pasir merupakan komoditas yang sangat bergantung pada ketersediaan dari luar Kebumen, karena terdapat praktik pasar Oligopoli di level pedagang besar atau pada level hulu (petani/peternak), perlunya dilakukan pengendalian dan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala untuk mengurangi disparitas harga.

Kata kunci: *Kepokmas, Struktur Pasar, Pola Distribusi, Supply Chain Management (SCM), Stabilisasi Harga, Policy Analysis*

PENDAHULUAN

Fluktuasi harga menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok sulit dipenuhi (Rasydi,2017). Data harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen menunjukkan adanya volatilitas harga selama semester pertama ditahun 2020 (Gambar 1). Berdasarkan

pemetaan harga dari aplikasi SIMBOK periode agustus 2019 - juli 2020 didapatkan gambaran fluktuasi harga terjadi pada bawang merah (cenderung naik), cabai merah (cenderung turun), daging ayam ras, telur ayam ras dan gula pasir (naik turun).



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2020 (diolah)

Gambar 1. Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, barang kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan termasuk barang bergejolak sehingga memiliki tingkat inflasi tertinggi dibandingkan sektor lainnya (Badan Pusat Statistik, 2019).Data BPS menunjukkan bahwa tingkat

inflasi barang dari sektor pangan menunjukkan angka 2,69 dan jauh di atas sektor lain (Tabel 1). Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai pemetaan harga barang kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan data nasional terkait dengan inflasinya.

Tabel 1. Inflasi Indonesia Menurut Pengeluaran

Tahun/Bulan	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Kesehatan	Pendidikan	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga
2020	2,69	0,46	0,97	-0,11	0,23	1,88
Januari	1,62	0,12	0,42	-0,14	0,13	0,46
Februari	0,95	0,21	0,34	0,02	0,09	0,41
Maret	0,10	0,12	0,21	0,00	0,02	0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Begitu juga kondisi inflasi di Kabupaten Kebumen. Meskipun barometernya mengikuti Kabupaten terdekat seperti Cilacap tentu saja dinamika inflasi Kota Kebumen tahun 2019 sampai dengan Desember sebesar 2,18 persen. Inflasi berkisar antara -0,45 persen sampai dengan 0,53 persen. Inflasi tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami inflasi sebesar 3,01 persen. Dengan demikian, terdapat beberapa komoditas yang

dominan menyumbang inflasi di Kebumen sepanjang tahun 2019. Komoditas-komoditas tersebut antara lain minyak goreng, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, gula pasir, dan emas perhiasan. Inflasi pada berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat, sebagai bentuk terjadinya volatilitas yang tinggi terhadap respon atas perilaku produsen dan konsumen di pasar. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Inflasi Bulanan Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019

Bulan	Kelompok Pengeluaran (%)							
	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Gas, Listrik, & Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	Transport, Komunikasi, & Jasa Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	0.18	0.09	0.43	0.17	0.68	0.29	0.40	-0.54
Februari	-0.22	-1.57	0.38	-0.14	1.27	0.01	0.11	-0.47
Maret	0.21	0.79	0.45	-0.26	-0.03	0.05	-0.03	0.04
April	0.32	1.85	0.07	-0.22	-0.15	-0.14	-0.03	-0.02
Mei	0.22	-0.78	0.72	0.26	0.75	0.57	0.12	0.48
Juni	0.53	1.53	0.26	0.03	0.38	0.80	0.04	0.53
Juli	0.43	2.13	-0.04	0.02	0.74	-0.41	1.00	-0.83
Agustus	0.29	0.60	0.16	0.12	0.94	0.38	-0.08	0.11
September	-0.45	-2.51	0.06	0.17	0.38	-0.33	0.04	0.12
Oktober	-0.03	-1.02	0.38	0.02	0.77	0.23	0.07	0.10
November	0.17	0.45	0.26	0.05	-0.04	0.20	0.00	0.00
Desember	0.49	1.65	0.33	0.20	0.02	0.18	0.10	0.13
Inflasi Tahun Kalender	2.18	3.14	3.52	0.42	5.87	1.83	1.76	-0.35

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020

Harga di tingkat konsumen sangat terkait dengan harga yang ditentukan oleh produsen dan pedagang. Penentuan harga oleh produsen, pedagang besar dan pedagang kecil dipengaruhi oleh perilaku ekonomi yang sangat berhubungan dengan struktur pasarnya. Pelaku ekonomi dalam menetapkan harga dibatasi oleh kekuatan yang tidak kasat mata, yakni struktur pasar (Oktavianti, 2013). Kajian struktur pasar penting dilakukan untuk mengetahui sifat barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar apakah homogen atau terdeferensiasi, mengetahui banyaknya jumlah pedagang dan pembeli dan bagaimana pembentukan harga terjadi (Indrawati, 2013). Apabila inflasi di suatu daerah lebih disebabkan oleh struktur pasar yang tidak kompetitif, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan kelembagaan pemasaran agar proses terbentuknya harga di pasar lebih dapat dikendalikan. Di Kabupaten Kebumen, ternyata harga kebutuhan pokok masyarakat selain disebabkan oleh perilaku pasar, juga struktur pasar yang dinamis apalagi saat kondisi pandemi Covid-19. Analisis volatilitas angka inflasi pada bahan makanan (khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat) menjadi urgen untuk mencapai stabilisasi harga. Hal ini dapat memicu terdegradasinya kualitas pertumbuhan ekonomi, Karena inflasi merupakan respon dari perilaku pasar, yaitu adanya perubahan perilaku *supply* dan *demand* sebagai gap, maka perlu dilihat keduanya dalam mendorong keseimbangan pasar baru. Oleh karena itu,

sebagai bagian dari upaya pengendalian harga komoditas daerah perlu dilakukan pemetaan harga komoditas, perilaku produksi dan konsumsi, struktur pasar, dan pola distribusi, serta margin pemasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) melakukan pemetaan harga (*price mapping*) komoditas kebutuhan pokok masyarakat di berbagai wilayah berbasis kecamatan atau pasar; (2) mengetahui kapasitas dan jumlah produksi berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat; (3) mengidentifikasi struktur pasar dan jalur distribusi komoditas kebutuhan pokok masyarakat; (4) menganalisis kendala dan penyebab terjadinya fluktuasi harga pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat; dan (5) Menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) merupakan salah satu kabupaten yang memiliki program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Penelitian dilakukan pada bulan Juni- November 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil survey lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari institusi/lembaga yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan data.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yaitu melalui wawancara dan observasi. Metode survei ini dilakukan sebanyak dua tahap yakni tahap survei pasar untuk mengetahui struktur pasar, pola distribusi dan harga. Tahap selanjutnya adalah survei pelaku ekonomi mulai dari tingkat petani/hulu hingga ke tingkat pemasaran akhir/pengecer/hilir. Survei tahap kedua dilakukan untuk mengetahui kinerja rantai pasok pada setiap barang kebutuhan pokok masyarakat yang dianalisis. Adapun pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melalui survey instansional.

Teknik pengumpulan data terutama dalam pemilihan responden ini juga dilakukan melalui (1) Observasi lapangan, dari pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan para pelaku rantai pasok seperti petani, pedagang/pengumpul, konsumen/masyarakat sekitar, serta lembaga formal dan non formal yang terkait dengan rantai pasok produksi dan pemasaran; (2) Opini Pakar, diperoleh dengan kuesioner yang disusun sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research), website sistem informasi kebutuhan pokok Kabupaten Kebumen dan informasi dari instansi terkait. Selanjutnya, mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan deteksi struktur pasar, analisis produksi dan supply chain management (SCM), asymmetric transmission price, dan policy analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Permasalahan yang sering terjadi pada barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) adalah terjadinya gejolak harga sehingga menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Stabilitas perekonomian daerah menciptakan stabilitas harga. Sebaliknya ketidakstabilan akan mengakibatkan pada biaya produksi yang tinggi dan harga konsumen yang tinggi. Oleh karena itu dilakukan pemetaan harga harian kepokmas, gejolak harga yang terjadi akan terlihat pada periode tertentu sehingga dapat diketahui kondisi ekonomi yang mempengaruhinya.

Pemetaan harga kepokmas perlu dilakukan di Kabupaten Kebumen sehingga dapat melakukan pengendalian inflasi daerah dan mencegah instabilitas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya yang selanjutnya memperbaiki indikator kemiskinan sehingga menurunkan angka kemiskinan. Harga kepokmas di Kabupaten Kebumen diperoleh dari harga harian selama 1 tahun terakhir yakni dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 (Gambar 2). Terlihat pada gambar bahwa barang kepokmas yang mengalami fluktuasi harga meliputi cabai, bawang, daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, minyak goreng dan beras. Gap harga tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Gap Harga Kepokmas di Kabupaten Kebumen Periode Agustus 2019 - Juli 2020

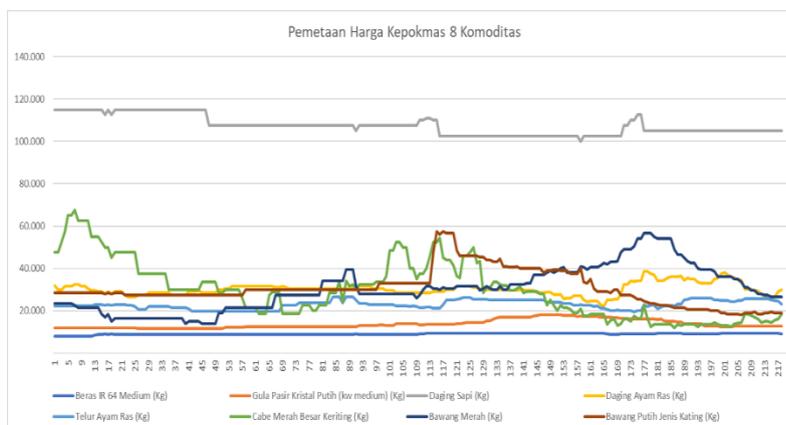
No	Nama Komoditas	Harga (Rp)		
		Max	Min	Gap
1	Cabe Rawit Merah (Kg)	87.500	13.500	74.000
2	Cabe Merah Besar Keriting (Kg)	67.500	12.000	55.500
3	Cabe Merah Besar Biasa Teropong (Kg)	67.500	12.000	55.500
4	Cabe Rawit Hijau (Kg)	63.500	14.000	49.500
5	Bawang Merah (Kg)	56.500	14.000	42.500
6	Bawang Putih Jenis Kating (Kg)	57.500	18.000	39.500
7	Daging Ayam Ras (Kg)	38.500	22.000	16.500
8	Daging Sapi (Kg)	115.000	100.000	15.000
9	Daging Ayam Kampung (Kg)	75.000	65.000	10.000
10	Ikan Laut/Asin Teri (Kg)	35.000	25.000	10.000
11	Telur Ayam Ras (Kg)	26.500	19.500	7.000
12	Kacang Hijau (Kg)	22.750	16.000	6.750

No	Nama Komoditas	Harga (Rp)		
		Max	Min	Gap
13	Gula Pasir Kristal Putih (kw medium)(Kg)	18.000	11.750	6.250
14	Kacang Tanah (Kg)	27.250	23.500	3.750
15	Minyak Goreng Curah (tanpa merek)	12.600	9.250	3.350
16	Telur Ayam Kampung (Kg/21 butir)	49.350	46.000	3.350
17	Jagung Pipilan Kering (Kg)	10.500	7.500	3.000
18	Kacang Kedelai Kuning Lokal (Kg)	12.500	10.000	2.500
19	Beras IR 64 Medium (Kg)	9.500	8.000	1.500
20	Ketela Pohon (Kg)	4.500	3.000	1.500
21	Beras IR 64 Premium (Kg)	10.750	9.350	1.400
22	Kacang Kedelai Ex Impor (Kg)	8.000	7.000	1.000
23	Minyak Goreng merek Bimoli (botol/liter)	14.000	13.250	750
24	Mie Instant (Bungkus)	2.500	2.300	200
25	Susu Kental Bendera (Cokelat) (385 gr/kaleng)	10.000	10.000	0
26	Susu Kental Indomilk Plain (Putih)(385 gr/kaleng)	9.000	9.000	0
27	Bubuk Indomilk (Cokelat)(400 gr)	37.500	37.500	0
28	Bubuk Dancow Fullcream (Putih) (400gr)	45.000	45.000	0
29	Garam Beryodium Bata (Kg)	10.000	10.000	0
30	Garam Beryodium Halus (Kg)	8.000	8.000	0
31	Tepung Terigu (Bogasari) ProteinSedang (Kg)	8.000	8.000	0

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Kebumen (data diolah)

Pemetaan harga kepokmas pada delapan komoditas di Kabupaten Kebumen secara tren harganya series dapat dilihat pada Gambar 3. Pemetaan harga per komoditas kepokmas

dilakukan untuk melihat volatilitas harga yang terjadi. Analisis selanjutnya yakni terkait rantai pasok (jalur distribusi) dan struktur pasar dilakukan pada 8 komoditas kepokmas tersebut.



Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kebumen (data diolah)

Gambar 4. Perkembangan Harga Kepokmas 8 Komoditas Di Kabupaten Kebumen

Kapasitas dan Jumlah Produksi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Kebumen

Kapasitas dan jumlah produksi komoditas kepokmas dikaji melalui sumber data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen. Kapasitas dan jumlah

produksi dikaji untuk melihat neraca pangan yang ada di Kabupaten Kebumen. Neraca pangan dapat menunjukkan ketersediaan bahan pangan yang ada dan seberapa besar kebutuhan. Neraca pangan yang negatif mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap daerah di luar kabupaten karena ketersediaan dalam daerah tidak mencukupi kebutuhan. Neraca pangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Neraca Pangan Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen

Komoditas	Satuan	Kebutuhan	Produksi	Keterangan
Beras	Ton	111.816,06	290.693,39	Surplus
Gula pasir	kg	398.436,52	0	Defisit
Cabai	Kg	31.956,84	1.461.100	Surplus
Bawang merah	Kg	87.252,52	30.500	Defisit
Bawang putih	Kg	67.582,88	0	Defisit
Daging sapi	Kg	53.607,97	1.378.092	Surplus
Daging ayam	Kg	63.216,95	4.336.732	Surplus
Telur ayam	Kg	64.734,16	173.037	Surplus

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen, 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas, neraca pangan pada komoditas kepokmas di Kabupaten Kebumen menurut data tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat lima komoditas yang surplus artinya kebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh produksi di dalam daerah Kebumen. Komoditas tersebut adalah beras, cabai, daging ayam, telur ayam dan daging sapi. Data produksi beras di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa beras mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah dan juga di luar Kebumen. Berdasarkan hasil KSA 2018 luas panen tanaman padi di Kabupaten Kebumen 82.938 hektar (BPS, 2020). Menurut hasil turun lapang, produksi yang surplus ini menyebabkan banyak tengkulak yang mengirim berasnya ke pasar induk di Purworejo (di luar Kabupaten Kebumen). Wilayah dataran rendah di bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan lumbung padi Kebumen dengan sumbangan padi sebesar 66,46% dengan produksi tertinggi ada pada Kecamatan Ambal, Puring, dan Adimulyo (BPS, 2020). Komoditas cabai menunjukkan neraca pangan yang surplus karena cabai merupakan komoditas sayuran terbesar setelah melinjo dan kangkung di Kabupaten Kebumen (BPS, 2020). Kabupaten Kebumen yang berada di daerah selatan yakni daerah pesisir banyak terdapat petani cabai. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen, terdapat lahan seluas 632 hektar menjadi tempat budidaya cabai. Dan data perdagangan menunjukkan bahwa cabai dari Kebumen diekspor ke Jabodetabek dan

Sumatera. Komoditas daging sapi juga memberikan neraca pangan yang surplus karena produksi daging sapi di Kabupaten Kebumen mampu memenuhi kebutuhan di dalam dan luar daerah Kebumen. Menurut hasil turun lapang, terdapat beberapa peternak sapi yang sekaligus menjadi pembibitan sapi sehingga menjadi penyuplai sapi lokal dan ekspor ke luar Kebumen. Sebaran populasi ternak sapi potong terbanyak di wilayah dataran rendah bagian selatan Kebumen yakni sebesar 65,5% (BPS, 2020). Adapun tiga komoditas lainnya yakni gula pasir, bawang merah, dan bawang putih merupakan komoditas pangan yang bergantung pada luar daerah. Berdasarkan observasi di lapangan, komoditas bawang merah yang adadi Kebumen merupakan komoditas yang diimpor dari luar kota yakni dari Nganjuk. Adapun komoditas bawang putih berasal dari importir. Sedangkan komoditas gula, didapatkan dari distributor di Yogyakarta dan Magelang. Luas panen komoditas bawang merah di Kabupaten Kebumen hanya sebesar 3 ha yakni berada di Kecamatan Ambal sebesar 2 ha dan Pejagoan sebesar 1 ha dengan produksi masing-masing sebesar 300 dan 5 kw (BPS, 2020). Luas panen yang sangat sedikit ini berpengaruh pada neraca pangan sehingga sangat tergantung pada suplai dari luar kota.

Struktur Pasar dan Jalur Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Kebumen

Kajian struktur pasar komoditas kepokmas di Kabupaten Kebumen dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan empat kriteria yakni banyaknya penjual dan pembeli, sifat komoditas, hambatan keluar masuk pasar, dan penentu serta informasi harga. Pasar monopoli dicirikan dengan jumlah pedagang yang sedikit (kurang dari 4), sifat barang heterogen, adanya hambatan besar dalam memasuki pasar, dan pedagang berperan sebagai penentu harga dan informasi harga hanya dimiliki oleh pedagang.

Pasar yang bersifat menuju persaingan sempurna memiliki karakteristik yang berkebalikandengan pasar monopoli. Pada pasar persaingan sempurna, karakteristik jumlah pedagang dan pembeli banyak, sifat barang yang homogen, tidak ada hambatan masuk pasar, pedagang berperansebagai penerima harga, dan informasi harga dapat mudah diketahui oleh sesama pedagang. Jalur distribusi kepokmas dilakukan melalui analisis rantai pasok yang dimulai dari hulu (petani) ke hilir (konsumen akhir). Di dalam jalur distribusi tersebut memerlukan pelaku pemasaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemasaran. Jalur distribusi pada delapan komoditas yang termasuk dalam kepokmas dilakukan dengan wawancara pedagang di pasar sebagai penyedia kepokmas di tingkat akhir/konsumen hingga pedagang besar/pengumpul /petani /peternak penyedia kepokmas di Kebumen. Pasar Kutowinangun, Pasar Tumenggungan, Pasar Karanganyar

dan Pasar Wonokriyo menjadi lokasi pengambilan data karena lokasi geografisnya dan Interaksi penjual dan pembelinya paling banyak dan merupakan pasar besar di wilayah Kabupaten Kebumen

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Beras

Struktur pasar pada komoditas beras berbeda-beda di tiap level pelaku pemasaran. Di tingkat pengepul dan pedagang besar, struktur pasar menunjukkan pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan pengepul dan pedagang besar memiliki pengaruh terhadap pembentukan harga yang terjadi di level pemasaran tersebut. Menurut hasil temuan saat turun lapang, jumlah tengkulak dibandingkan jumlah petani memiliki perbandingan yang cukup besar. Dalam satu desa biasanya terdapat satu tengkulak. Petani menggarap lahan yang sedikit dan tidak mampu mengakses pengolahan padi sehingga memiliki ketergantungan pada tengkulak. Struktur pasar pada level hilir menggambarkan pasar persaingan sempurna. Menurut Hardjanto (2014), pasar persaingan sempurna pada komoditas beras terjadi karena pelaku usahanya yang besar, sifat produk yang standar atau homogen, tidak adanya hambatan masuk pasar dan tidak adanya kontrol terhadap harga. Struktur pasar komoditi beras di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Struktur Pasar Komoditas Beras Di Kabupaten Kebumen

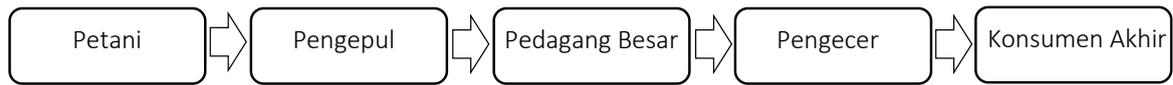
Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Petani	Pembeli sedikit	Rendah	Homogen	Penerima Harga	oligopsoni
Pengepul	Penjual dan pembeli sedikit	Rendah	Homogen	Penentu Harga	Oligopoli
Pedagang Besar	Penjual Sedikit	Rendah	Homogen	Penentu Harga	Oligopoli
Pengecer	Banyak	Rendah	Homogen	Penentu Harga	Persaingan Sempurna

Sumber: Data Primer (diolah)

Aliran barang berupa beras dimulai dari petani sebagai produsen utama dalam rantai pasok beras (Gambar 5). Pengepul membeli gabah kering dalam bentuk karung atau riskan dari petani. Pengepul berperan sebagai

pengumpul, penggiling gabah, dan penyuplai beras ke pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen seperti Pasar Kutowinangun, Pasar Tumenggungan, Pasar Karanganyar, Pasar Wonokriyo, dan lainnya. Sebagian pengepul dari Kabupaten Kebumen berjualan di pasar khusus

beras yang ada di Kutoarjo.



Gambar 5. Jalur Distribusi Komoditas Beras Di Kabupaten Kebumen

Pedagang besar dari daerah di sekitar Kutoarjo seperti Solo, Sragen, Wonosobo, Magelang, Brebes termasuk dari Kabupaten Kebumen membeli beras dari pasar khusus beras di Kutoarjo. Pemenuhan cadangan beras oleh pedagang besar dilakukan dengan membeli beras dari petani yang memiliki garapan lahan sedikit. Pengecer atau pedagang kecil membeli beras ke pedagang besar untuk dilanjutkan ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir. Jalur distribusi pada komoditas beras ini senada dengan penelitian Apituley, et al., (2018) yang mengemukakan bahwa pola distribusi pada produk pangan meliputi petani, pengumpul, retailer dan konsumen. Efisiensi pemasaran terjadi pada pola distribusi yang pendek yakni dari petani ke konsumen.

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Gula Pasir

Struktur pasar komoditas gula pasir di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa

terdapat pasar oligopoli di tingkat pedagang besar (Tabel 6). Pedagang besar menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen ada sekitar 34 toko yang menyuplaigula pasir di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pedagang besar ada banyak pelaku. Namun berdasarkan turun lapang, pelaku yang menjadi penjual gula pasir kepada pedagang besar adalah berasal dari distributor tertentu misal di Kota Magelang dan Yogyakarta. Jumlah distributor yang sedikit ini memberikan pengaruh pada penentuan harga. Para pedagang besar biasanya sudah berlangganan distributor gula pasir dari luar kota dan harga yang terjadi ditentukan distributor. Struktur pasar bagi industri gula adalah oligopoli karena jumlah perusahaan yang sedikit, sifat produk yang standar, hambatan masuk yang tinggi dan kontrol terhadap harga bersifat sedang (Hardjanto, 2014).

Tabel 6. Struktur Pasar Komoditas Beras Di Kabupaten Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/ Penerima harga	Struktur Pasar
Pedagang Besar	Penjual sedikit, Pembeli banyak	tinggi	Homogen	Penentu Harga	Oligopoli
Pengecer	Penjual dan pembeli banyak	rendah	Homogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa aliran barang berupa gula pasir dimulai dari pabrik gula pasir sebagai produsen utama dalam rantai pasok gula pasir. Distributor menyalurkan barang berupa gula pasir dalam bentuk karung/sak dengan satuan kwintal sampai ton kepada produsen. Distributor berperan sebagai pemasok gula pasir ke pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen seperti Pasar Kutowinangun, Tumenggungan, Pasar Karanganyar, Pasar Wonokriyo, dan lain-lain.

Pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen tidak hanya berhubungan dengan satu distributor saja, distributor yang bekerjasama dengan pedagang besar tersebut antara lain distributor dari Madiun, Yogyakarta, dan lain-lain. Pengecer atau pedagang kecil membeli gula pasir ke pedagang besar untuk dilanjutkan ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir.



Gambar 6. Jalur Distribusi Gula Pasir Di Kabupaten Kebumen

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Cabai Merah

Struktur pasar komoditas cabai merah di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa terdapat pasar oligopoli di tingkat petani ditunjukkan pada Tabel 7. Di tingkat petani, terjadi pasar oligopsoni karena jumlah pembeli jauh lebih sedikit dari jumlah petani. Berdasarkan hasil turun lapang, dalam satu desa hanya ada satu atau dua pengepul yang membeli cabai dari petani. Petani hanya sebagai penerima

harga dari pengepul.

Di tingkat pengepul terjadi persaingan oligopolistik. Para pengepul dan pedagang besar biasanya bertemu di pasar lelang di Kecamatan Mirit. Praktik lelang ini menunjukkan kekuatan pelaku pemasaran yang saling menentukan harga. Menurut Hardjanto (2014), pasar persaingan sempurna pada level pengecer cabai terjadi karena pelaku usahanya yang besar, sifat produk yang standar atau homogen, tidak adanya hambatan masuk pasar dan tidak adanya kontrol terhadap harga

Tabel 7. Struktur Pasar Cabai Merah Di Kabupaten Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Petani	Penjual banyak, Pembeli sedikit	Rendah	homogen	Penerima harga	oligopsoni
Pengepul	Penjual dan Pembeli sedikit	Tinggi	homogen	Penentu harga	Persaingan oligopolistik
Pedagang Besar	Penjual sedikit Pembeli banyak	Sedang	homogen	Penentu harga	oligopoli
Pengecer	Penjual dan pembeli banyak	rendah	homogen	Penerima harga	Persaingan sempurna

Sumber: Data Primer (diolah)

Aliran barang berupa cabai merah dimulai dari petani sebagai produsen utama dalam rantai pasok cabai merah. Pengepul membeli cabai merah dalam satuan kilo dari petani. Pengepul berperan sebagai pengumpul sekaligus

pengirim cabai merah ke pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen seperti Pasar Kutowinangun, Pasar Tumenggungan, Pasar Karang-anyar, Pasar Wonokriyo, dan sebagainya (Gambar 7).



Gambar 7. Jalur Distribusi Cabai Merah

Selanjutnya untuk pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen tidak hanya berhubungan dengan satu pengepul saja, banyak pengepul dari

daerah lain yang bekerjasama dengan pedagang besar tersebut seperti pengepul dari Magelang, Yogyakarta, Purworejo, Cilacap dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan karakteristik cabai dariluar lebih disukai karena dinilai lebih menarik, lebih besar dan panjang, serta harga yang lebih murah sehingga cocok dengan preferensi konsumen yang ada di Kabupaten Kebumen. Pengecer atau pedagang kecil membeli cabai merah ke pedagang besar untuk dilanjutkan ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir.

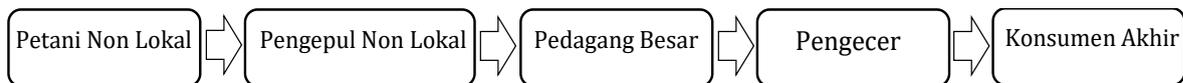
Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Bawang Merah

Struktur pasar komoditas bawang merah

Tabel 8. Struktur Pasar Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Pedagang Besar	Penjual sedikit Pembeli banyak	Sedang	homogen	Penentu harga	oligopoli
Pengecer	Penjual dan pembeli banyak	rendah	homogen	Penerima harga	Persaingan sempurna

Sumber: data (diolah), 2020.



Gambar 8. Jalur distribusi bawang merah di Kabupaten Kebumen

Jalur distribusi Aliran barang bawang merah berupa bawang merah dimulai dari petani sebagai produsen utama dalam rantai pasokbawang merah. Pengepul membeli bawang merah dalam satuan kilo dari petani. Pengepul berperan sebagai pengumpul sekaligus pengirim bawang merah kepedagang besar di pasar yang ada di Kebumen seperti Pasar Kutowinangun, Pasar Tumeng- gungan, Pasar Karanganyar, Pasar Wonokriyo, dan sebagainya.

Pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen tidak hanya berhubungan dengan satu pengepulsaja, banyak pengepul dari daerah lain yang bekerjasama dengan pedagang besar tersebut seperti pengepul dari Madiun, Nganjuk, NTB, Probolinggo, Parangtritis (Yogyakarta), Pati, dan sebagainya Pengecer atau pedagang kecil membeli bawang merah kepedagang besar untuk dilanjutkan ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir. Aliran barang bawang merah dari tengkulak ke pedagang besar ini menggunakan sistem retail storage with customer pick up. Menurut Rabiqy dan Radike

di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 8. Bawang merah merupakan komoditas yang banyak disuplai dariluar daerah. Struktur pasar yangdikaji di Kabupaten Kebumen dimulai dari level pedagang besar. Di level pedagang besar, terdapat sedikit penjual dan memiliki kemampuan menentukan harga yang telah ditentukan distributor dari luar daerah. Beberapa pedagang besar yang ditemui di lapangan mengaku berperan sebagai penyalur saja, hanya mendapat marjin dari harga yang sudah ditentukan oleh distributor dari luar daerah.

(2017),sistem retail storage with customerpick up diterapkan pada komoditas bawang merah dengan cara mirip kemitraan. Tengkulak bekerjasama dengan distributor dengan menitipkan bawang ke pedagangbesar di pasar induk dan menerapkan harga marjin. Para pedagang besar mendapatkan keuntungan dari marjin harga yang sudah ditetapkan distributor di luar daerah.

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Bawang Putih

Komoditas bawang putih di Kabupaten Kebumen struktur pasar yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 9. Bawang putih disuplai dari importir. Struktur pasar bawang putih yang dikaji di Kabupaten Kebumen dimulai dari level pedagang besar. Di level pedagang besar, terdapat sedikit penjual dan memiliki kemampuan menentukan harga sehingga memiliki ciri struktur pasar oligopoli meskipun di lapangan dijumpai ada beberapa pedagang besar yang menjadi pengecer karena distributor

dari importir memperluas jangkauan pasarnya hingga ke pedagang pengecer sehingga

pedagang besarkalah bersaing dalam harga.

Tabel 9. Struktur Pasar Komoditas Bawang Putih di Kab. Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Pedagang Besar	Penjual sedikit Pembeli banyak	Sedang	homogen	Penentu harga	oligopoli
Pengecer	Penjual dan pembeli Banyak	rendah	homogen	Penerima harga	Persaingan sempurna

Sumber: data (diolah), 2020.

Aliran barang berupa bawang putih dimulai dari importir sebagai produsen utama dalam rantai pasok bawang putih. Importir mengimpor barang dari luar negeri. Importir berperan sebagai pemasok barang di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kebumen. Bawang putih yang masuk ke Kabupaten Kebumen 100% berasal dari importir. Distributor mengambil barang dari

importir. Distributor berperan sebagai penyalur barang dari importir ke pedagang besar. Distributor yang menyalurkan bawang putih untuk Kabupaten Kebumen berasal dari Solo, Surabaya, dan daerah lainnya. Pedagang besar menjual barang kepada pedagang pengecer. Konsumen membeli bawang putih dari pedagang pengecer



Gambar 9. Jalur distribusi bawang putih

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Daging Sapi

Struktur pasar komoditas daging sapi di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 10. Daging sapi merupakan komoditas yang potensial di Kabupaten Kebumen karena memiliki jumlah populasi tertinggi setelah kambing dan domba (BPS,2020). Jumlah peternak sapi potong ada 25.029 orang dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Gambar 10 yang menunjukkan aliran barang atau daging sapi dimulai dari peternak lokal yang berjumlah 25.029 orang. Asal sapi

tidak hanya dari lokal tetapi dari import. Sapi import langsung masuk ke RPH yang kemudian di potong di RPH milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sapi impor masuk ke Kabupaten Kebumen ketika kurs dollar turun dalam bentuk bakalan, yang nantinya akan transit di suatu pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok kemudian nantinya sapi impor tersebut akan menuju kandang penggemukan ke perusahaan atau PT yang siap menampung dan selanjutnya dapat di tampung di RPH mandiri sesuai permintaan. Untuk sapi lokal di Kebumen biasanya diambil dari luar Kebumen dari daerah Timur seperti Yogyakarta dan Purworejo .

Tabel 10. Struktur Pasar Komoditas Daging Sapi di Kabupaten Kebumen

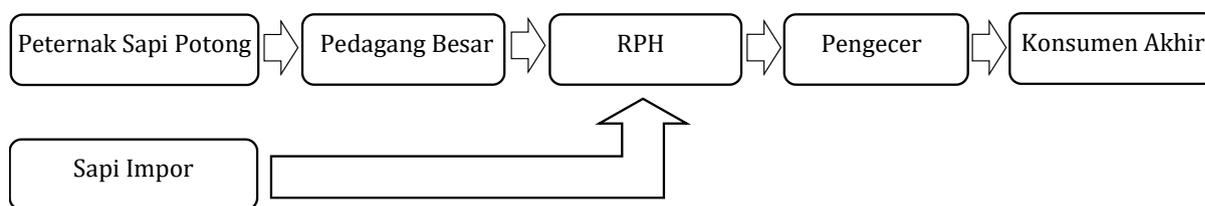
Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Peternak	25.029	Rendah	Heterogen	Penentu Harga	Persaingan Sempurna

Pedagang Besar	>10	Rendah	Heterogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna
Pengecer	>10	Rendah	Heterogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna

Sumber: data (diolah), 2020.

Berdasarkan narasumber yang kami temui, semakin ke Timur, harga sapi semakin murah dikarenakan lebih banyaknya populasi sapi di daerah tersebut daripada sapi di daerah Barat. Sapi impor biasanya dijual langsung ke pejagal yang ada di RPH, sementara sapi lokal biasanya langsung ke antar pasar. Pedagang besar membeli sapi yang masih hidup dari peternak yang kemudian di bawa ke RPH.

Pedagang besar lebih memilih melakukan pemotong sapi di RPH milik sendiri dikarenakan RPH di Kabupaten Kebumen memiliki kapasitas yang belum memadai, sehingga kurang bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Daging sapi yang sudah bersih kemudian diteruskan ke pedagang pengecer dipasar tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen



Gambar 10. Jalur Distribusi Daging Sapi Di Kabupaten Kebumen

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas Daging Ayam

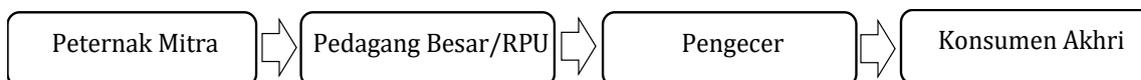
Struktur pasar komoditas daging ayam di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 11. Daging ayam merupakan komoditas yang potensial di Kabupaten Kebumen karena memiliki jumlah populasi unggas tertinggi setelah ayam kampung (BPS, 2020). Jumlah

peternak ayam ada dua kategori yakni peternak mandiri dan peternak mitra. Jumlah peternak mitra di Kabupaten Kebumen ada 36 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen, 2020). Meskipun jumlah peternak mitra tergolong banyak, peternak mitra memiliki kemampuan dalam menentukan harga di pasar sehingga memiliki ciri pasar persaingan oligopolistik

Tabel 11. Struktur Pasar Komoditas Daging Ayam di Kabupaten Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/Penerima harga	Struktur Pasar
Peternak Mitra	Pedagang dan pembeli banyak	Tinggi	Homogen	Penentu Harga	Persaingan oligopolistik
Pedagang Besar	Pedagang dan Pembeli banyak	Rendah	Homogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna
Pengecer	Pedagang dan Pembeli banyak	Tidak ada	Homogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna

Sumber: data (diolah), 2020.



Gambar 11. Jalur distribusi daging ayam di Kabupaten Kebumen

Jalur distribusi barang berupa daging ayam broiler dimulai dari peternak mitra lokal

dan peternak mitra non lokal. Aliran barang dimulai dari peternak dalam dan luar daerah

yang berperan sebagai produsen. Permintaan pasar di Kabupaten Kebumenerhadap peternak mitra lokal adalah ayam yang memiliki bobot lebih dari 2 kilogram. Pedagang besar yang sebagian besar memiliki RPU (Rumah Potong Unggas) membeli ayam hidup dari peternak mitra melalu kantor cabang yang di miliki kemitraan dengan peternakseperti PT. Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed, dan sebagainya. Pedagang besar mengambil ayam hidup dalam jumlah besar dan memasukan ke RPU kemudian diolah menjadi daging ayam siap jual di pasaran. Pedagang pengecer membeli daging dari pedagang besar dan kemudian di

teruskan ke konsumen.

Struktur Pasar Dan Jalur Distribusi Komoditas TelurAyam

Struktur pasar komoditas daging ayam di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 12. Jumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Kebumen ada 37 orang. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan distributor telur yang berasal dari luar daerah Kebumen. Oleh karena itu, peternak ayam petelur tidak mampu menentukan harga.

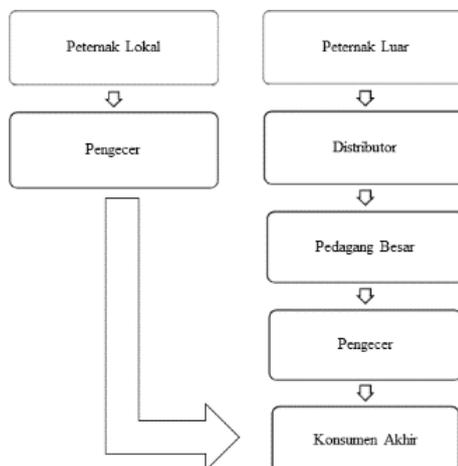
Tabel 12. Struktur Pasar Komoditas Telur Ayam di Kabupaten Kebumen

Pelaku	Jumlah Pelaku	Hambatan Masuk Pasar	Sifat Produk	Penentu/ Penerima harga	Struktur Pasar
Peternak Lokal	37	rendah	Homogen	Penerima harga	Persaingan Sempurna
Distributor	Pedagang sedikit, pembeli sedikit	sedang	Homogen	Penentu harga	Persaingan oligopolistik
Pedagang Besar	25	sedang	Homogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna
Pengecer	pedagang dan pembeli banyak	Tidak ada	Homogen	Penerima Harga	Persaingan Sempurna

Sumber: data (diolah), 2020.

Aliran barang berupa telur ayam dibagi menjadi dua aliran yaitu peternak lokal dan peternak luar. Aliran barang atau telur ayam di mulai dari peternak lokal sebagai produsen

utamanya. Peternak lokal menjual barang kepada pengecer karena keterbatasan volume produksi hariannya. Pengecer membeli barang dari peternak secara langsung dan meneruskan ke konsumen.



Gambar 12. Jalur distribusi telur ayam di Kabupaten Kebumen

Aliran barang atau telur ayam di mulai dari peternak luar yang berperan sebagai produsen. Barang di distribusikan melalui distributor ke pedagang besar. Pedagang besar di pasar yang ada di Kebumen tidak hanya berhubungan dengansatu distributor saja, banyak distributor dari daerah lain yang bekerjasama dengan pedagangbesar tersebut seperti distributor dari Yogyakarta, Temanggung, dan sebagainya. Pengecer atau pedagang kecil membeli telur ayam ke pedagang besar untuk dilanjutkan ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir.

Analisis Kendala dan Penyebab Fluktuasi Harga Kepokmas di Kabupaten Kebumen

Upaya melihat kendala dan penyebab terjadinya flutuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen secara objektif dilakukan dengan melakukan analisis assymetric transmission price. Analisis ini dilakukan dengan melihat transmisi harga Kepokmas dari hulu mempengaruhi harga hilir. Dimana variable harga hulu (X1) berpengaruh terhadap harga hilir (X2) untuk semua komoditas Kepokmas di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dan temuan terjadinya transmisi harga dari hilir ke hulu, maka dapat dikatakan harga-harga komoditasKepokmas di Kabupaten Kebuman terjadi fluktuasi harga yang signifikan, gap atau disparitas harga untuk kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen. Kendala tersebut, selain disebabkan oleh banyak faktor yang menjadipenyebab kelangkaan barang, juga oleh keseimbangan pasar dan sistem distribusi yang masih menjadi permasalahan. Distribusi komoditas Kepokmas dari sentraproduksi hingga pasar pembentukan harga terjadi diantara keduanya. Dengan demikian, terjadinya hal demikian disebabkan oleh beberapa Kendal dan hambatan. Adapun penyebab terjadinya fluktuasi harga kepokmas di Kabupaten Kebumen yang menjadi fokus riset ini adalah bahwa ternyata terdapat berbagai hambatan sehingga menjadipenyebab inefisiensi struktur pasar kepokmas yang terbentuk. Hal ini yang menjadi transmisi dalam implementasi kebijakan kepokmas. Adapun kendala dan sekaligus penyebabnya adalah (1) keseimbangan pasar tidak stabil, (2) minimnya jumlah produksi kepokmas, (3) manajemen distribusi dan kontrolnya yang belum optimal, (4) sistem manajemen logistik kepokmasterjadi hambatan,

(5) sistem informasi harga kepokmas masih perlu ditingkatkan utilitas dan optimalisasinya, dan (6) aksesibilitas intermediari pasar (produsen dan konsumen akhir) perlu ditingkatkan.

Review Kebijakan Pengendalian Harga Kepokmas Kabupaten Kebumen

Analisis kebijakan makro dalam mendorong Dilakukan klasterisasi Ekonomi berbasis Sumberdaya ekonomi terkait Kepokmas

Secara makro, dalam hal ini kebijakan ekonomi pangan. Hal ini berkaitan dengan klasterisasi ekonomi berbasis pangan, khususnya kepokmas. Hal ini secara signifikansi perlu dilakukan pengklasteran koridor ekonomi di Kabupaten Kebumen dalam produksi komoditas tertentu. Pembangunan kawasan industri perlu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem logistik dan distribusi, mulai sektor hulu hingga sektor hilir. Melalui rantai pasok dan rantai nilai yang akan mendorong perbaikandan kualitas ekonomi.

Analisis kebijakan pengendalian harga pasar pangan

Dalam kasus kepokmas di Kabupaten Kabumen, penerapan harga tunggal untuk komoditas tertentu dapat dilakukan dengan menerapkan cross-subsidi antar daerah. Ide implementasinya sederhana, harga komoditas diberlakukan secara nasional, harga rata-rata yang mengkover biaya distribusi total. Komponen biaya distribusi ini mencakup biaya transportasi, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. Selain penerapan harga tunggal, pemerintah dalam implementasi sistem harga yang dilakukan dapat menerapkan kebijakan ceiling price. Dalam kebijakan ceiling price, pemerintah daerah sebaiknya responsive terhadap pemerintah pusat, dimana dalam melakukan intervensi berupa harga tertinggi untuk komoditas tertentu. Kebijakan ceiling price yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan harga, terutama pada kondisi inflasi, struktur pasar monopoli, dan untukmengurangi disparitas harga.

Akibatnya, konsumen di daerah dengan cost yang rendah tetap membayar harga beli yang relatif sama dengan konsumen didaerah cost yang tinggi karena tingginya biaya

distribusi. Selisih margin tinggi untuk pasar dengan biaya distribusi rendah akan menjadi subsidi bagi konsumen di daerah pasar dengan biaya distribusi tinggi. Penerapan kebijakan harga tunggal atau ceiling price ini ternyata di Kabupaten Kebumen berdampak tidak efektif apalagi terjadi perbedaan harga suatu komoditas disebabkan oleh biaya distribusi, bukan karena motif spekulasi dari produsen dan biaya ekonomi tinggi karena ketidakefisienan sistem distribusi.

Analisis kebijakan optimalisasi saprotan dan teknologi level produksi (hulu)

Komoditas kepokmas di Kabupaten Kebumen merupakan komoditas yang mudah rusak, baik pada level budidaya maupun penanganan pascapanennya yang kurang baik. Faktor yang menyebabkan beberapa komoditi kepokmas tinggi sampai ke tingkat eceran adalah iklim dan musiman. Misalnya, komoditas budidaya cabai juga sangat bergantung dari cuaca dan iklim bahkan produksinya tidak optimal. Maka dari itu penggunaan (Screen House) pada lahan tertutup dan terbuka sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya produksi, menekan pertumbuhan hama dan penyakit, menghemat penggunaan air, meningkatkan produksi, dan dapat ditanam sepanjang tahun. Penyediaan infrastruktur pasca panen dan pemasaran hasil melalui pengembangan pasar induk di daerah sentra produksi.

Analisis kebijakan optimalisasi logistic dan terminal agribisnis

Optimalisasi logistic menjadi sangat penting, dimana terminal pasokan dan logistic menjadi sangat penting, terutama adanya dukungan untuk membuat gudang penyimpanan resi gudang yang berpendingin (coldstorage). Terutama untuk komoditas berbasis pangan. Namun demikian, optimalisasi logistic ini menjadi sangat penting guna menekan harga dan efisiensi biaya logistic. Peran pemerintah daerah, utamanya Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menciptakan stabilisasi harga yang menguntungkan dari tingkat petani hingga pengecer dengan pemerintah memantau mengenai harga jual dari setiap komponen rantai pasok jadi pemerintah dapat mengetahui jika ada komponen yang merasa rugi dan bisa segera diatasi oleh pemerintah. Memberikan

bantuan modal pada petani melalui kredit usaha dengan bunga yang murah agar petani dapat memiliki modal yang cukup untuk bertanam cabai pada musim tertentu.

Perlunya dilakukan pengendalian dan monitoring harga kepokmas yang berkala untuk mengurangi disparitas harga

Pengendalian dan monitoring harga kepokmas dilakukan guna mengecek kondisi pasokan barang, mengetahui tren harga barang, serta melaporkan secara rutin harga bahan kebutuhan pokok kepada pemerintah daerah maupun provinsi, guna sebagai rujukan penentuan kebijakan terkait pangan. Hal ini dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjaga ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga. Sehingga inflasi daerah Kabupaten Kebumen dapat dikendalikan. Hal ini juga perlu control pemerintah daerah terhadap struktur pasar untuk komoditas kepokmas yang berada di Kabupaten Kebumen.

Analisis optimalisasi kinerja sistem logistik daerah (silogda)

Kinerja sistem logistik daerah (silogda) Kabupaten Kebumen ditujukan tidak hanya untuk menekan biaya transportasi dan komunikasi akibat jarak yang jauh dari sentra produksi ke pasar. Komoditas kepokmas yang memiliki ketergantungan pada daerah di luar Kebumen dapat ditekan gejolak harganya melalui silogda yang memiliki kinerja yang optimal. Begitu pun pada komoditas kepokmas yang potensial di dalam daerah Kebumen karena dapat menekan biaya transportasi dan komunikasi karena jalur distribusi tersedia informasinya bagi pelaku pemasaran. Silogda diharapkan dapat mengendalikan disparitas harga yang terjadi pada komoditi kepokmas.

Analisis optimalisasi data dan informasi harga pasar komoditas kepokmas melalui pembuatan aplikasi sistem estimasi harga (forecasting) pada komoditi kepokmas

Aplikasi sistem estimasi harga ini dibuat dengan didukung oleh ketersediaan perkembangan harga harian baik di level hulu (produsen dan pedagang besar) maupun di level hilir (pengecer dan konsumen akhir). Ketersediaan perkembangan harga harian ini

harus terinput agar estimasi harga harian di periode berikutnya dapat diketahui. Aplikasi sistem estimasi dibuat user friendly sehingga dapat diakses oleh baik di level hulu (produsen) maupun hilir (konsumen akhir). Aplikasi sistem informasi ini sangat berguna sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kebumen yakni sebagai bahan pengambilan keputusan pelaku pemasaran di level hulu.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemetaan harga kepokmas menunjukkan terjadinya fluktuasi harga pada delapan komoditas kepokmas terpilih yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga kepokmas sehingga akan mengakibatkan inflasi.
2. Terjadinya disparitas harga berbasis komoditas kepokmas dan pasar Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan oleh jarak, sehingga biaya transportasi, logistik, dan komunikasi menjadi faktor penyebabnya.
3. Berdasarkan perhitungan neraca pangan di Kabupaten Kebumen diperoleh bahwa terdapat 5 komoditas pangan yang surplus dan 3 komoditas yang defisit. Kondisi ini akan sangat bergantung pada stok dari luar Kebumen padahal di Kebumen sendiri dapat mendorong produksinya secara optimal.
4. Struktur pasar untuk komoditas kepokmas berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh rantai pasok dan jalur distribusi yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan terjadinya pasar tidak sempurna pada pasar komoditas kepokmas. Akibatnya berdampak terhadap fluktuasi harga kepokmas dan memperkuat pelaku usaha pada jalur distribusi/ SCM sebagai price maker.
5. Keseimbangan pasar komoditas kepokmas di Kabupaten Kebumen tidak stabil disebabkan minimnya jumlah produksi, logistik, dan manajemen distribusi yang belum terkontrol secara optimal

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan/ rekomendasikan: Pemerintah harus fokus kepada bagaimana menyediakan stok dan produksi untuk mencukupi kebutuhan. Optimalisasi utilisasi sistem informasi kepokmas menjadi hal penting ke depan. Optimalisasi produksi dan stok komoditas dan peran pasar yang ada di Kabupaten Kebumen dengan mendorong peningkatan produktivitas produksinya dan aksesibilitas pasarnya. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan harga secara intensif di tingkat hulu (produsen) agar dapat diketahui fluktuasi yang ada lebih tinggi di tingkat hilir (pasar) atau di tingkat hulu dalam kerangka manajemen rantai pasok. Untukantisipasi mengenai kendala dan penyebab terjadinya fluktuasi harga pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen sebaiknya dilakukan inovasi melalui regulasi dan kebijakan terkait dengan kepokmas. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat efektif dalam upaya pengendalian harga termasuk pengendalian pasar.

Kebijakan berkaitan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen akan sangat efektif manakala dioptimalkan peran TPID kabupaten Kebumen dimana memonitor dari level hulu hingga hilir, dimana hal tersebut tertera dalam perencanaan hingga pada level implementasi dan evaluasi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, maka beberapa rekomendasi dan implikasi kebijakan dari hasil kajian ini adalah:

1. Perlu dilakukan klusterisasi ekonomi dalam kerangka rencana strategis daerah oleh Pemerintah Daerah, khususnya kluster komoditas pokok masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui zonasi ekonomi pangan. Hal ini dimaksudkan agar pola pengembangan ekonomi berbasis sektoral (kepokmas) sebagai kebutuhan dasar di Kebumen lebih terjamin dan mudah dimonitor serta dikembangkan.
2. Perlu dilakukan pengendalian harga pasar pangan secara

berkala terutama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasar komoditas pokok masyarakat dengan mengoptimalkan peran TPID. Dimana terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, BUMD, dan pemerhati/akademisi/komunitas. Hal ini dimaksudkan agar produsen dan konsumen dapat memonitor harga agar mudah dikendalikan. Dipandang perlu melakukan koordinasi dan sinergitas terkait dengan OPD/SKPD terkait dalam mengoptimalkan peran TPID inisecara berkala.

3. Untuk mendorong jumlah produksi Kepokmas, kebijakan optimalisasi saprotan dan teknologi pada level produksi (hulu) menjadi sangat perlu dilakukan. Pemanfaatan berbagai injeksi anggaran dan program dari pusat dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas, khususnya Kepokmas berbasis pangan/pertanian.
4. Perlunya pemerintah daerah melakukan pengendalian harga komoditas kepokmas secara berkala dan strategis, yang dilakukan tidak hanya di level produsen/hulu (petani/peternak) tetapi juga di level konsumen/hilir (konsumen/konsumen akhir). Oleh karena itu, sebaiknya SIMBOK dilengkapi dengan informasi harga produsen.
5. Perlu dilakukan pengendalian dalam pembentukan rantai nilai dan rantai pasok dari hulu sampai dengan hilir yang dapat membentuk pasar Kepokmas yang berdaya saing dan kompetitif.
6. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja sistem logistik daerah (SILOGDA) oleh pemerintah daerah Kab Kebumen, yang ditujukan tidak hanya untuk menekan biaya transportasi dan komunikasi akibat jarak yang jauh dari sentra produksi ke pasar. Diharapkan disparitas harga Kepokmas dapat dikendalikan melalui berbagai sarana resi gudang dan logistik.
7. Perlu dibuat aplikasi sistem estimasi harga (forcasting) pada komoditi

kepokmas sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kebumen sebagai bahan pengambilan keputusan strategi pengendalian harga atau inflasi volatile di Kabupaten Kebumen. Disarankan sistem ini terkoneksi dengan SIMBOK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti.2019. BPS Catat Rata-rata Harga Beras Terus Naik Sejak Agustus. Sumber: <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4e5619296/bps-catat-rata-rata-harga-beras-terus-naik-sejak-agustus>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Ajalli M, Azimi H, Balani AM, Rezaei M. 2017. Application of fuzzy AHP and COPRAS to solve the supplier selection problems. *International Journal of Supply Chain Management*. 6(3): 112-119.
- Apituley, Y. M.T.N, Lopulalan, Y, Salakory, R. A., dan Bawole, D. 2018. Market Structure, Conduct And Performance Of Scad (Decapterus russeli) In Kota Ambon. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol.15 No. 3
- Ardharsyah, 2019. Lima Fakta Impor Bawang Putih RI, Raja Impor Terbesar di Dunia. Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190418192332-4-67674/5-fakta-impor-bawang-putih-ri-raja-impor-terbesar-di-dunia> Diakses pada 20 Agustus 2020.
- Asrol. 2018. Mitigasi Resiko dan Peningkatan Nilai Tambah pada Rantai Pasok Agroindustri Gula Tebu. Tesis. IPB, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Inflasi Indonesia Menurut Pengeluaran.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2020. Kabupaten Kebumen dalam Angka Tahun 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2020. Kabupaten Kebumen dalam Infografis 2020.
- Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen .2019. Penghitungan Ketersediaan Pangan Tahun 2019.
- Engkus, 2017. Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, Vol. 18 (1)
- Gilbert CL, Morgan CW. 2010. *Food Price*

- Volatility. *Philosophical Transactions of The Royal Society* 365. 3023–3034.
- Hafiyyan. 2019. Jaga Inflasi Desember, Jateng Fokus Benahi Volatile Food. Sumber: <https://semarang.bisnis.com/read/20191204/536/1177990/jaga-inflasi-desember-jateng-fokus-benahi-volatile-food>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Hardjanto, A. 2014. Volatilitas Harga Pangan dan Pengaruhnya terhadap Indikator Makroekonomi Indonesia. Tesis, Institut Pertanian Bogor.
- Idris, M. 2020. Biang Kerok Anjloknya Harga Telur Ayam Menurut Peternak. Sumber: <https://money.kompas.com/read/2020/05/04/105342826/biang-kerok-anjloknya-harga-telur-ayam-menurut-peternak?page=all>. Diakses pada 1 September 2020.
- Indrawati, T. 2013. Analisis Perilaku Pedagang Dalam Pembentukan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 1
- Jamehshooran BG, Shahrour AM, Haron HN. 2015. Assessing supply chain performance through applying the SCOR model. *International Journal of Supply Chain Management*. 4(1): 1-11.
- Kusumah, T. A. 2018. Elastisitas Transmisi Harga Komoditas Cabai Merah di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal* 7 (3)
- Liu, M., Kang S. H. dan Ahn, C. W. 2016. Analysis of the Market Structure and Shift-effects in North China Ports. *The Asian Journal of Shipping and Logistics* 32(3) (2016) 179-186
- Maghfiroh, I. S., dan R Wibowo. 2019. Manajemen Risiko Rantai Pasok Tebu (Studi Kasus di PTPN X). *Jurnal Pangan*. Vol. 28, No. 3.
- Novika, S. 2020. KPPU Beberkan Penyebab Tingginya Harga Bawang Merah. Sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5047288/kppu-beberkan-penyebab-tingginya-harga-bawang-merah> diakses pada 19 Agustus 2020.
- Rabiqy, Y., Radike. 2017. Metode Mitigasi Risiko Rantai Pasok Bawang Merah. *Jurnal Optimalisasi* Vol. 4, No. 3.
- Rusastra, I. W., Rachman, B., Sumedi, Sudaryanto, T. 2004. Struktur Pasar dan Pemasaran Gabah-Beras dan Komoditas Kompetitor Utama. <http://pse.litbang.pertanian.go.id-09> diakses pada 30 September 2020.
- Oktavianti, B. 2013. Pemetaan Struktur Pasar Dan Pola Distribusi Telur Ayam Ras Penyumbang Inflasi Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Harga. *Jurnal Akuntabel* ; Volume 10 No. 1
- Pipit, Pranoto, Y. S., Evahelda. 2019. Analisis Volatilitas Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* Vol. 3.No. 3.
- Rani, N. M., Taufikurrahman, M. R., Lenggono, P. S. 2019. Analisis Rantai Pasok Cabai Merah Keriting (*Capsicum annum L*) di DKI Jakarta (Studi Kasus: Pasar Induk Kramat Jati). *Jurnal Economic Resources* Vol 2, Nomor 1.
- Rasyidi, M. 2017. Prediksi harga bahan pokok nasional jangka pendek menggunakan ARIMA. *Jurnal of Information systems engineering and bisnis intelegent*, 3(2), 107-112
- Sahara, S., Nicholas M., Randy S. and Wendy J. U. 2015. Determinants and effects of small chili farmers' participation in supermarket channel in Indonesia. *Bulletin of Indonesian economic Studies*, 51(3), 445-460
- Salvatore, D. 1996. *Ekonomi Internasional*. Edisi Jilid ke-5. Terjemahan. PT Gelora Aksara Pratama: Jakarta.
- Saptana, M. Maulana, Ningsih, R. 2017. Produksi dan Pemasaran Komoditas Broiler di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 14 No. 2, Juli 2017
- Stephani, C. A. 2015. Peramalan Inflasi Nasional Berdasarkan Faktor Ekonomi Makro Menggunakan Pendekatan Time Series Klasik dan ANFIS. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. Surabaya. Vol 4 No.1.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ekonomi Mikro*. LP3ES, Jakarta
- Sumaryanto, 2009. Analisis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utam dengan Model ARCH/GARCH. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 27 (2).
- Biodata Penulis : Muhammad Rizal Taufikurohman, Irene Kartika Eka, Ardiansyah, Indah Setiawati Universitas Trilogi, Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Srusuh Jurutengah

Implementation Of Management Of Village Owned Business Entities In Srusuh Jurutengah Village

Katon Lintang Ramadhan^{1)a)}

¹⁾ Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

^{a)} Jl. Veteran No.2, Kebumen, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311

Email: katonlintangrix@gmail.com

Naskah Masuk: 24 November 2022

Naskah Revisi: 26 Januari 2023

Naskah Diterima: 15 Februari 2023

ABSTRACT

This study focuses on the management of BUM Desa in Srusuh Jurutengah Village. The theory used is Edward III's Policy Implementation theory where Policy Implementation can be seen from 4 dimensions, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Primary and secondary data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed using a fishbone diagram. The triangulation technique was used in testing the validity of the data. The results of this study indicate that the management of BUM Desa has been running well in terms of the legal entity status that has been obtained and good cooperation with several parties such as the village government and also PT. Pertamina. The involvement of the younger generation can also be a reference that the Tunas Mandiri Village BUM will be sustainable in the long term.

Keywords: *Implementation, Policy, Management, Village Owned Enterprises*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Srusuh Jurutengah. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Edward III dimana Implementasi Kebijakan dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pengumpulan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan diagram tulang ikan (fishbone diagram). Teknik triangulasi digunakan dalam uji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa sudah berjalan dengan baik dilihat dari status badan hukum yang sudah diperoleh dan kerjasama yang baik dengan beberapa pihak seperti pemerintah desa dan juga PT. Pertamina. Keterlibatan generasi muda juga dapat menjadi acuan bahwa BUM Desa Tunas Mandiri akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.*

PENDAHULUAN

Badan usaha milik desa merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dimana tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian lebih jelas lagi Badan Usaha Milik Desa di jelaskan melalui Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai bumdes pada pasal 1 angka 6 yang menjelaskan pengertian bumdes sebagai sebuah badan usaha. Bumdes mengalami kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum karena belum ada aturan yang menjelaskan lebih lanjut. Akibatnya bumdes kesulitan mendapatkan permodalan dari bank dan juga kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga seperti CV dan PT yang sudah berbadan hukum jelas.

Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha ber badan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh dari badan usaha yang berbadan hukum adalah PT dan CV. Karakteristik badan usaha yang termasuk badan hukum adalah badan usaha tersebut merupakan subjek hukum disamping manusia sebagai subjek hukum. Pengaruh nya bisa terjadi apabila badan usaha tersebut mengalami kerugian dan bangkrut maka hanya harta perusahaan yang tersita atau terpengaruh sedangkan harta pribadi pengurus nya tetap aman karena subjek hukum nya adalah badan hukum tersebut. Maka dari itu perlu nya pengaturan bumdes sebagai sebuah badan hukum agar pengelolaan bumdes tersebut dapat berjalan dengan lebih baik (Alfiansyah, 2021).

Kabupaten Kebumen saat ini memiliki 403 bumdes yang berdiri dan 81 diantaranya sedang dalam proses pendaftaran badan hukum. Kementrian desa akan memberikan reward kepada 20 bumdes pertama yang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran badan hukum yaitu berupa bantuan modal 75 juta rupiah. Salah satu dari 20 bumdes tersebut adalah BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah. BUM Desa Tunas Mandiri merupakan satu satunya BUM Desa di Kecamatan Puring yang sudah terverifikasi sebagai badan hukum. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi desa lain sehingga dapat memiliki bumdes yang terverifikasi badan hukum.

Pengelola atau pengurus BUM Desa memiliki peran besar dalam pengelolaan BUM Desa. Pengelolaan yang baik juga akan meningkatkan hasil dari BUM Desa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran pengelola BUM Desa dalam pengelolaan BUM Desa, sehingga BUM Desa Tunas Mandiri bisa selangkah lebih maju terutama dalam proses pendaftaran badan hukum dari BUM Desa. Peneliti juga ingin meneliti mengenai bagaimana proses dari pemilihan pengurus BUM Desa dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan BUM Desa saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan yang telah diputuskan dan akan memberikan penjelasan terhadap dampak suatu kebijakan. Dengan adanya implementasi kebijakan publik, tentunya akan memberikan manfaat terhadap sasaran kebijakan dan pembuat kebijakan. Kebijakan publik yang menghasilkan outcome akan dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran yang dituju. Implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan program atau kebijakan yang direalisasi. Implementasi dapat berupa operasionalisasi, perintah ataupun keputusan-keputusan yang dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2014).

Pada intinya implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Erwan dan Dyah, 2012).

Edward III mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Agustino, 2014).

1. Komunikasi

Syarat yang pertama agar efektifnya implementasi dalam kebijakan merupakan bagian dari pelaksana dan mampu memahami kegiatan yang harus dilakukan, dengan sistem inilah proses dalam komunikasi secara sesama akan berjalan dengan teratur. Komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi terdapat juga tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a. Transmisi
Menghendaki agar informasi atau kebijakan publik tidak disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja, melainkan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan.
- b. Kejelasan
Menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakannya bisa diterima secara jelas.
- c. Konstitensi
Perintah yang disampaikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumber Daya

Implementor sumber daya mempunyai posisi utama untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya disini digunakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang memiliki anggota yang telah ditetapkan dan dengan kemampuan mumpuni dalam mengimplementasikan kebijakan, kewenangan, dan fasilitas dibutuhkan dalam mewujudkan rancangan kebijakan menjadi fungsi pelayanan publik. Elemen yang terdapat dalam sumber daya yaitu:

- a. Staf
Sumber daya manusia yang sanggup untuk melakukan tugas apalagi kualitas dan kuantitas yang berkualitas.
- b. Anggaran
Budget memiliki keterkaitan dengan harta benda yang dipergunakan didalam suatu kebijakan yang mana akan berjalannya suatu kebijakan.
- c. Informasi

Informasi memiliki dua bentuk, yaitu: (1) informasi diperlukan di dalam melaksanakan suatu kebijakan; (2) informasi yang tepat terhadap ketaatan personil individu ataupun organisasi didalam penerapan peraturan pemerintah.

- d. Wewenang
Wewenang akan menentukan suatu program yang akan dilaksanakan dalam suatu kebijakan.
- e. Fasilitas
Fasilitas fisik menjadi faktor penting didalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, sifat demokratis, kejujuran dan sebagainya. Jika implementor mempunyai disposisi yang bagus, maka dia juga akan dapat melakukan kebijakan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap dan perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan bisa menjadi tidak efektif. Hal – hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu:

- a. Pengangkatan Birokrat
Pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan yang seharusnya merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi pada kebijakan yang sudah ditetapkan.
- b. Insentif
Dimensi insentif adalah salah satu teknik yang disarankan dalam mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan (reward), baik uang, pujian atau yang lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mempunyai tugas mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya adalah aspek struktur birokrasi yang penting di setiap organisasinya adalah terdapat Standard Operating Procedure

(SOP). SOP menjadi suatu petunjuk dan pedoman terhadap setiap implementor jika bertindak. Struktur birokrasi terlalu panjang pasti cenderung selalu melemahkan pengawasannya dan juga menimbulkan red-tape, yakni prosedur dalam birokrasi yang selalu rumit. Sehingga menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel. Dalam struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi yaitu:

- a. Melakukan Standard Operating Procedures (SOP)
SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan, Edward III dalam Dyah dan Arif (2014:43).
- b. Melakukan Fragmentasi
Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislative, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan pembaruan dan juga pemisahan aturan tentang desa yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini menggambarkan adanya pembaruan dan upaya untuk mempertegas posisi dari desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa menjadi memiliki kewenangan yang lebih jelas dan lebih spesifik dalam aturannya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada bab x tentang badan usaha milik desa dijelaskan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan usaha milik desa dapat menjalankan usaha-usaha pelayanan umum dan juga kegiatan usaha lain yang sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa bumdes terdiri dari 2 jenis yaitu Badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. BUMDesa / BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021

Peraturan ini berisikan tentang pedoman dalam pendaftaran, pemringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pendaftaran BUMDesa dilakukan oleh pendiri BUMDesa melalui system informasi Desa. Pendaftaran BUMDesa dilakukan dengan tujuan agar BUMDesa dapat diakui secara sah sebagai suatu badan hukum yang resmi dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham. Selain BUMDesa, dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai pedoman bagi BUMDesa Bersama.

Peraturan menteri desa ini juga menjelaskan bagaimana bentuk pelaporan dari setiap kegiatan dalam BUMDesa. Salah satu contoh yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah mengenai pedoman dan tata cara dalam pengadaan barang/jasa dalam BUMdesa.

Peraturan Daerah Kabupaten kebumen nomor 6 tahun 2017

Peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 mengatur tentang pengelolaan dan pendirian

BUMDesa di Wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam peraturan ini dijelaskan apa saja yang belum dijelaskan dalam undang-undang desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi desa dalam mendirikan, dan mengelola Badan Usaha Milik Desa. Selain itu juga dijelaskan mengenai tatacara dalam pelaksanaan kebijakan BUMDesa ini.

Kepengurusan dalam BUMDesa terdiri dari pengurus yang diangkat melalui musyawarah desa bersamaan dengan pendirian BUMDesa. Yang dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus BUM Desa adalah Perangkat Desa, BPD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kerja sama Desa, Badan Kerja sama Antar Desa.

Peraturan Desa nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Desa Srusuh Jurutengah nomor 5 tahun 2021 menggantikan peraturan Desa nomor 1 tahun 2016 tentang pendirian BUMDesa di Desa Srusuh Jurutengah. Peraturan desa ini menjadi dasar pendirian BUMDesa baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa "Tunas Mandiri" Desa Srusuh Jurutengah. Selain itu juga dijelaskan mengenai pembentukan dan pengangkatan dari Pengurus BUMDesa yang selanjutnya disahkan melalui surat keputusan Kepala desa.

METODE PENELITIAN

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menggali informasi yang berkaitan dengan gejala, fakta dan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meoleong, 2005).

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data

yang diteliti. Dalam Penelitian ini, tujuan penelitian adalah untuk

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui dan menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi factor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik penentuan informannya yaitu dengan purposive sampling yaitu dengan pertimbangan tertentu misalnya kedudukan/jabatan. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksudkan misalnya adalah informan tersebut dianggap memiliki peran penting dan mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti atau informan tersebut memiliki kedudukan/jabatan di suatu instansi terkait (Sugiyono, 2014). Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterkaitan antara permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan langsung

dengan permasalahan tersebut, kemudian penulis akan melakukan wawancara sesuai dengan konsep dan tujuan dari penelitian ini. Informan dalam Penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bidang Usaha BUM Desa dan Unsur Masyarakat Desa.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara, wawancara pada dasarnya adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan juga data yang sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memilih jenis wawancara semi terstruktur untuk menemukan pemecahan masalah secara lebih terbuka dimana narasumber akan memberikan pendapat dan ide idenya. Kemudian teknik pengumuman data lainnya adalah observasi dan dokumentasi.

Observasi merupakan salah satu bentuk cara untuk mengumpulkan data dengan mendokumentasikan dan merefleksikan segala kegiatan yang ada di lapangan selama penelitian. Kemudian semua hasil dari observasi akan dicatat secara terbuka sesuai dengan tema penelitian.

Menurut Subagyo (2011:63) Observasi adalah mencatat setiap kejadian yang terjadi dalam proses pengamatan. Keuntungan melakukan pengamatan secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. Bisa mencatat setiap pergerakan terkecil dalam setiap kejadian yang sedang diamati;
- b. Mendapatkan informasi tidak harus melalui komunikasi secara verbal karena sering terdapat narasumber yang tidak mau melakukan komunikasi langsung untuk memberikan informasi sehingga penulis harus mengamati sendiri apa yang terjadi.

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi di lapangan

Dokumentasi akan sangat identic dengan pengambilan gambar dari suatu tempat atau kegiatan dengan menggunakan alat berupa kamera. Di dalam penelitian ini, dokumentasi akan menjadi cara bagi penulis untuk mendapatkan gambaran yang factual di lapangan berupa tulisan, gambar atau lainnya.

Arikunto (2010:274) menjelaskan bahwa dokumentasi berkaitan dengan catat-mencatat, buku, koran, majalah, dan sebagainya yang dijadikan sumber dalam mencari informasi. Pendapat Burhan Bungin (2014:121) "metode dokumenter adalah metode penghimpunan dari data diperlukan pada metodologi penelitian sosial".

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan teknik tulang ikan atau *fishbone*. Diagram tulang ikan atau *fishbone diagram* adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect diagram*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar didirikannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Srusuh Jurutengah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Badan Usaha Milik Desa awalnya berdiri pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa melalui peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memutuskan pembentukan ulang Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah Desa. Dalam Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 2 Juli 2021 dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, serta unsur lain terkait di desa, diambil beberapa keputusan yaitu :

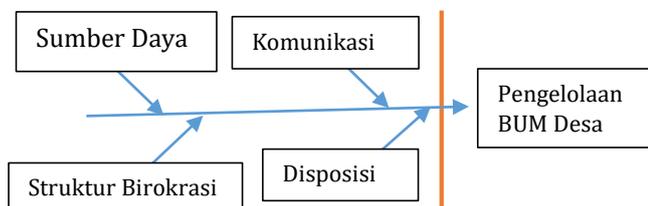
- a. Menyepakati dan menyetujui Pendirian BUM Desa di Desa Srusuh Jurutengah dengan nama BUM Desa Tunas Mandiri sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021
- b. Menyepakati dan menyetujui Perdes Pendirian beserta Anggaran Dasar BUM Desa Tunas Mandiri.
- c. Menelaah dan memberikan masukan Program Kerja BUM Desa Tunas Mandiri.
- d. Menyepakati dan mengangkat Perangkat organisasi, sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya BUM Desa Tunas Mandiri

- e. Menyepakati dan menyetujui atas penyertaan modal pada BUM Desa Tunas Mandiri terdiri dari :
 1. Modal Awal Desa: Rp 170.000.000,-
 2. Penambahan Modal Desa : Rp 40.000.000,-
 3. Pengembangan usaha : Rp 16.279.000,-
- f. Menyepakati Pencabutan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pendirian BUM Desa.

Dalam Musyarah Desa juga memutuskan mengenai apa saja jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUM Desa. Jenis Usaha BUM Desa merupakan hasil dari masukan masyarakat desa yang diputuskan secara bersama. Kebutuhan masyarakat yang menjadi jenis usaha BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Disinilah peran BUM Desa sebagai Katalisator dan Akselerator Perekonomian Masyarakat Desa.

Berdasarkan teori dan teknik analisis data yang penulis ambil, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Diagram Tulang ikan



Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensi penting yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik karena setiap kebijakan akan berjalan dengan baik apabila komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan. Dalam komunikasi ini terdapat berbagai hal yang menentukan keberhasilan komunikasi seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi.

Komunikasi dalam kebijakan pengelolaan BUM Desa terjadi antara Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah, Pengelola BUM Desa dan juga Masyarakat Desa. Media Komunikasi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di Badan Usaha Milik Desa adalah melalui Musyawrah Desa. Musyawrah desa dilaksanakan untuk mengambil keputusan

penting dalam BUM Desa seperti Pemilihan Pengurus dan Kerjasama BUM Desa dengan pihak lain.

Pada saat pembentukan BUM Desa Tunas Mandiri, Musyawrah Desa menjadi media komunikasi semua elemen yang ada di desa. Musyawrah yang dipimpin oleh ketua BPD berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan keputusan tentang BUM Desa.

Selain musyawrah desa, komunikasi yang dilakukan pengurus BUM Desa yaitu melalui Rapat Anggota Tahunan. Dalam rapat tersebut dilakukan beberapa agenda yaitu: pelaporan hasil keuangan BUM Desa, evaluasi kinerja BUM Desa dan Penyusunan Rencana Kerja BUM Desa untuk tahun yang akan datang. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan pada saat akhir tahun anggaran yaitu pada bulan desember yang dihadiri pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Komunikasi dalam internal BUM Desa juga sangat penting dalam pengelolaan BUM Desa. Direktur BUM Desa sebagai pemimpin dalam BUM Desa harus dapat berkoordinasi dengan pengurus lain dalam berbagai hal selain itu antar pengurus juga saling berkomunikasi dengan baik sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik.

Salah satu contoh dari komunikasi antara BUM Desa dan Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah adalah program e-warung yang dilaksanakan oleh unit usaha perdagangan. E-warung merupakan bagian dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPN) akan mendapatkan bantuan uang setiap bulannya melalui kartu debit yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung yaitu unit usaha BUM Desa. Pemerintah desa berkomunikasi dengan BUM Desa terkait data penerima yang selalu berubah ubah. Saat ini ada 128 KPM di Desa Srusuh Jurutengah.

Sumber Daya

Sumber daya dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia dalam pengelolaan BUM Desa adalah pengurus BUM Desa yang terdiri dari Direktur BUM Desa, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha. Berikut ini adalah daftar dari Pengurus BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah.

Tabel 1.1
Daftar Pengurus BUM Desa
Berdasarkan Usia dan Pendidikan

Nama	Usia	Pendidikan
Kasno	53 Tahun	SLTA
Wahyu Wibowo	29 tahun	S2
Yasin		SLTA
Sarwono		SLTA
Yogo	42	S1
Pratomo	Tahun	
Agus	42	SLTA
Suryono	Tahun	
Amad Darmuji	36 Tahun	SLTA
Titi Prihati Budaeni	64 Tahun	S1
Sariyah	53 Tahun	SLTA
Adang	36 Tahun	SLTA
Setiawan		
Sri Iriyani	57 Tahun	SLTA

Sumber: Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah

Dari tabel diatas dapat dilihat komposisi sumber daya manusia dalam kepengurusan BUM Desa. Pengurus BUM Desa Tunas Mandiri terdiri atas berbagai latar belakang dan usia. Hadirnya generasi yang termasuk usia muda dan juga memiliki latar belakang pendidikan yang baik memberikan gambaran bahwa peran generasi muda hadir dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Srusuh Jurutengah. Para generasi muda ini yang diharapkan dapat menjadi penerus dalam kepengurusan BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah. Saat ini usia termuda yang ada dalam kepengurusan BUM Desa adalah sebagai pegawai yang dijabat oleh ketua BPD Desa Srusuh Jurutengah. Latar belakang pendidikan dari setiap pengurus juga sudah cukup baik mengingat kondis di Desa Srusuh Jurutengah akan sangat sulit untuk mencari sumber daya yang memiliki latar pendidikan baik dan mau bekerja di BUM Desa. Kebanyakan generasi muda yang berpendidikan lebih memilih untuk bekerja di kota besar daripada bekerja di desa.

Sumber daya bukan manusia merupakan sumberdaya lain yang mendukung kegiatan BUM Desa. Sumber daya manusia dapat berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUM Desa.

Unit Usaha Warung BUM Desa menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat desa. Unit usaha warung juga

bekerja sama dengan pemerintah desa dalam peyaluran bantuan langsung kepada masyarakat. Dengan ini akan meningkatkan pendapatan dari usaha BUM Desa.

Gambar 1.2
Unit Usaha BUM Desa



Unit usaha peternakan sapi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memelihara sapi dan menerima bagi hasil dari penjualan anakan sapi.

Gambar 1.3
Unit Usaha Peternakan Sapi



Disposisi

Hal yang menjadi perhatian dalam disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. *Pertama*, pengangkatan birokrat dalam hal ini pengurus BUM Desa Tunas Mandiri dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa peserta musyawarah

diberikan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai pengurus BUM Desa. Selain itu, pemerintah desa sebelumnya juga melakukan penjurangan pengurus dengan melihat potensi yang ada di desa. Direktur BUM Desa Tunas Mandiri saat ini memiliki latar belakang pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola BUM Desa. Saat ini, selain menjadi Direktur BUM Desa, beliau juga merangkap sebagai Tenaga Profesional Pendamping (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Kecamatan. Kedua jabatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kemudian untuk pengurus lain juga merupakan yang sudah memiliki pengalaman dan memang dinilai ahli dalam bidangnya.

Pengangkatan pengurus yang sesuai dengan keahliannya memberikan dampak positif dalam pengelolaan BUM Desa. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan pengelolaan BUM Desa adalah diperolehnya status badan hukum dari kementerian hukum dan HAM sehingga memudahkan BUM Desa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagai contoh dengan PT.Pertamina sebagai agen penjualan gas elpiji secara resmi. Keuntungannya adalah pasokan yang lancar dan harga nya yang stabil.

Kedua, Insentif merupakan bentuk penghargaan dari usaha yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa. Insentif dari pengurus bumdes diperoleh dari keuntungan setiap unit usaha yang pengaturannya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Insentif yang diberikan sangat membantu sebagai sumber pendapatan bagi pengurus BUM Desa sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja. Keuntungan dari setiap usaha bumdes sebenarnya masih lebih kecil dari usaha serupa milik swasta. Hal ini karena dasar dari pendirian BUM Desa adalah untuk membantu masyarakat desa dengan unit usaha yang ada. Jadi, setiap usaha BUM Desa lebih mementingkan manfaat langsung kepada masyarakat daripada keuntungan semata.

Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi" (Winarno, 2012). Dari kedua karakteristik tersebut penerapannya dalam pengelolaan BUM Desa

Tunas Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama standar oprasional prosedur atau (SOP), penerapan SOP dalam sistem pengelolaan BUM Desa pada saat ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajuan badan hukum yang sudah disetujui oleh kementerian hukum dan HAM. Dalam proses tersebut, pengelola BUM Desa Tunas Mandiri harus memehuni segala dokumen persyaratan agar proses badan hukum segera selesai. Kedua, fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dan wewenang. Fragmentasi yang dilakukan oleh BUM Desa harus berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Tunas Mandiri. Dalam BUM Desa Tunas Mandiri penyebaran tanggung jawab dan wewenang sudah berjalan dengan baik, hal ini karena adanya pengurus yang aktif dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri. Selain itu dukungan dari pemerintah desa yang dengan cepat menerbitkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga BUM Desa juga memacu pengurus untuk segera bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Tabel 1.1

Susunan Organisasi BUM Desa "Tunas Mandiri"

No	Nama	Jabatan
1.	Kasno	Penasihat
2.	Wahyu Wibowo	Ketua Pengawas
3.	Yasin	Pengawas
4.	Sarwono	Pengawas
5.	Yogo Pratomo	Direktur
6.	Agus Suryono	Sekretaris
7.	Amad Darmuji	Bendahara
8.	Titi Prihati Budaeni	Kepala Bidang Usaha Perdagangan Besar dan Eceran
9.	Sariyah	Staf Bidang Usaha Perdagangan Besar dan Eceran
10.	Adang Setiawan	Kepala Bidang Usaha Peternakan
11.	Sri Iriyani	Kepala Bidang Usaha Penyewaan Alat Kontruksi

Sumber: Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah

Peran Tenaga Ahli Dalam Pengelolaan BUM Desa

Tenaga Ahli merupakan individu yang direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan

dan Anak Kabupaten Kebumen. Setiap tenaga ahli diberi tugas untuk mendampingi beberapa BUM Desa. Sesuai dengan namanya, tenaga ahli merupakan individu yang memiliki keahlian dan telah dibekali ilmu untuk digunakan dalam menjalankan tugasnya mendampingi setiap BUM Desa dalam menjalankan usahanya.

Peran dari Tenaga ahli cukup penting dalam membimbing dan juga sebagai tempat konsultasi bagi pengurus BUM Desa. Tenaga ahli juga memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan dan informasi lain dari instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Akan tetapi tenaga ahli tidak memiliki kewenangan untuk ikut melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh jurutengah sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari kemajuan BUM Desa yang sudah terverifikasi sebagai badan hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM. Kemudian dilihat dari sisi pengurusnya, terdapat sumber daya yang mumpuni dari segi latar belakang pendidikan dan juga keahlian. Keterlibatan generasi muda juga dapat menjadi acuan bahwa BUM Desa Tunas mandiri akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Kolaborasi antara pemerintah desa dan BUM Desa Tunas Mandiri juga dapat terlihat dengan keterlibatan BUM Desa Tunas Mandiri dalam program dari pemerintah seperti Program Bantuan Pangan non-Tunai.

Kekurangan yang peneliti temukan dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri yaitu belum adanya digitalisasi dalam proses pengelolaan BUM Desa seperti contohnya website BUM Desa Tunas mandiri. Kemudian dalam pengurus juga belum memiliki sekretariatnya sendiri sehingga sekretariat sementara hanya bergabung dengan unit usaha toko atau warung.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai masukan bagi pengelolaan BUM Desa adalah untuk dapat membuat portal digital agar segala kegiatan dari BUM Desa dapat dipantau oleh seluruh masyarakat. Kemudian laporan keuangan juga perlu dipublikasikan agar dapat dinilai dan dicermati oleh masyarakat umum. Perlu adanya kantor sekretariat tersendiri untuk mempermudah koordinasi dan pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Liow, H., Lengkong, F.D.J., Palar, N. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TONDEGESAN KECAMATAN KAWANGKOAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (61), 1-13.
- Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (2), 212-219.
- Sidiq, Fajar.(2017).Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) : Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*. 5(3), 36-46.
- Hidayah, Dasep Dodi.(2020). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. 1(3), 26-31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Srusuh Jurutengah nomor 5 Tahun 2021 Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah.

Biodata Penulis : Katon Lintang Ramadhan, lahir pada tanggal 23 Desember 1999 di Kabupaten Kebumen. Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bekerja di Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai CPNS.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan Direktur BUM Desa



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Ketua BPD

“Tela Mandiri” menuju Berdikari Praktek Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal

“Tela Mandiri” to be Berdikari Case of Women’s Empowerment through Local Potensial

Jinggarani RD

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Jalan Merdeka No. 2, Gd. F Komplek Setda Kebumen 54311
Email: jinggarani75@gmail.com

Naskah Masuk: 24 November 2022

Naskah Revisi: 6 Januari 2023

Naskah Diterima: 15 Februari 2023

ABSTRACT

Women’s empowerment is done by creating a micro-enterprises based on local potential. It’s more effective if in groups. This paper aims to find out the strategies and steps through women’s empowerment. This case study of The Women Farmers Groups “Tela Mandiri” in Giritirto Village, Karanggayam District. This paper uses a qualitative approach and use the theory of women’s empowerments and Medium and Small Enterprises and get some points. The strategies that used is participatory training and mentoring. The member of the group has the same right and position as subject in training and mentoring. The empowerment carried out through providing awareness of their potency, capacity and understanding with the training in production, financial management etc. Members can increase their capacity to scale up their business. Their business is success to increase the added value, and develop marketing networks..

Keywords: *empowerment, women, local potential*

ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan pedesaan dapat dilakukan melalui rintisan usaha mikro berbasis potensi lokal. Pemberdayaan perempuan akan lebih efektif jika dilakukan dalam bentuk kelompok. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan tahapan apa saja yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan perempuan. Tulisan ini mengambil kasus pada desa Giritirto Kec. Karanggayam dalam bentuk Kelompok Wanita Tani “Tela Mandiri”. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori pemberdayaan perempuan dan UMKM dapat dihasilkan beberapa poin penting. Strategi yang dipilih untuk pemberdayaan kelompok adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan yang bersifat partisipatif, menempatkan anggota kelompok pada posisi yang sama yaitu sebagai subyek. Tahapan pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui pemberian kesadaran akan potensi dan kapasitasnya, memberikan pemahaman, melalui pelatihan dan pendampingan, dan pemanfaatan kapasitas serta pendamping untuk memajukan usaha kelompok. Usaha mikro yang dirintis kelompok termasuk dalam kategori berhasil karena selain mampu meningkatkan nilai tambah, kelompok juga mampu mengembangkan jejaring pemasaran dalam jangka waktu pelatihan dan pendampingan.

Kata kunci : *pemberdayaan, perempuan, potensi lokal*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Perempuan adalah proses yang dilakukan terhadap individual maupun kelompok yang mengarusutamakan peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Pemberdayaan perempuan berarti memberikan kekuatan dan kemampuan terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan agar dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya dan menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya (Pujono, 1996 dalam Purwaningsih 2021). Pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender dewasa ini diutamakan pada berbagai sektor antara lain sektor politik yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam poses politik. Pada sektor sosial dapat dilihat pada saat ini perempuan memiliki kesamaan peran, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada pembangunan dan sektor publik, serta pada sektor ekonomi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak.

Pemberdayaan perempuan akan lebih efektif ketika dilakukan dalam bentuk perkumpulan atau kelompok karena kecenderungan perempuan untuk berkelompok. Program pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Proses dan aktifitas pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh kelompok perempuan sedikit banyak membawa implikasi yang cukup signifikan dalam pola relasi perempuan di dalam keluarga dan masyarakat (Partini, 2014 dalam Purnamasari, 2020). Salah satu yang akan dilaksanakan dalam program pemberdayaan ini adalah dengan membentuk dan mengembangkan usaha (UMKM) dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitar masyarakat dengan harapan dapat membentuk kelompok yang memiliki usaha dan mandiri sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Salah satu kelompok yang didampingi adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Tela Mandiri desa Giritirto Kec. Karanggayam dengan mengembangkan produk olahan singkong mengingat potensi singkong di sekitar Desa

Karanggayam cukup melimpah. Selain itu peningkatan nilai tambah singkong selama ini belum dilakukan. Masyarakat sekitar hanya menjual singkong tanpa diolah terlebih dahulu sehingga nilai tukar petani singkong sangat rendah. Kelompok wanita tani dipilih dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi melalui pengembangan usaha mikro berbasis pertanian. Bagaimanakah strategi dan tahapan pemberdayaan perempuan pada KWT Tela Mandiri di desa Giritirto Kec. Karanggayam?

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan menurut Kementrian P3A adalah upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Makna pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan, dalam konteks ini dapat dikatakan pemberdayaan adalah menciptakan sumber daya dan menawarkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Cole, 2017 dalam Khan 2018). Pemberdayaan perempuan juga dimaknai sebagai peningkatan kemampuan untuk mengontrol keuangan, sumber daya sosial dan kemampuan intelektual yang dilihat dari tingkat keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, sosial dan politik.

Perempuan dapat dikatakan berdaya ketika mereka benar-benar mampu mengendalikan hidup dengan caranya sendiri, mampu membawa perubahan sosial (cornwall, 2016 dalam Khan 2018). Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk lebih memberdayakan perempuan yaitu dengan membentuk suatu perkumpulan bagi kaum perempuan yang didirikan di masyarakat dengan melakukan berbagai aktivitas kegiatan serta kepelatihan (Khan, 2018). Kondisi geografis dan kemiskinan dapat menjadi persoalan terutama bagi perempuan yang memiliki keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih lagi kemampuan dan akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik. Ditengah keterbatasan dan melihat karakteristik masyarakat tersebut maka pemberdayaan

perempuan melalui kelompok atau perkumpulan akan lebih efektif.

Kesadaran perempuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki cenderung rendah didorong oleh beberapa faktor seperti rendahnya pendidikan jika dibandingkan dengan laki-laki dan kebiasaan atau kepercayaan yang memosisikan perempuan sebagai penanggungjawab urusan rumah tangga dan keluarga. Perempuan yang berpendidikan akan membantu seluruh keluarga dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi pada pola-pola pemberdayaan perempuan sebagai sarana untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Jahangir, 2008 dalam Batool, 2020). Setidaknya terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan (Purwaningsih, 2021):

1. Welfare (Kesejahteraan)
Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada perempuan namun untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara. Pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk menguasai lingkungan, memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.
2. Akses
Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja dan semua pelayanan publik yang setara. Akses juga termasuk akses teknologi dan informasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial.
3. Consientisation (konsientisasi)
Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.
4. Participation (Partisipasi)
Kesetaraan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi.
5. Equality of Control

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki dalam posisi yang sama

Program pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan ketrampilan berupa pelatihan dan pendampingan pengembangan UMKM pangan olahan singkong yang diharapkan menjadi UMKM yang mandiri dan dapat berkembang menjadi produk unggulan di desa Giritirto Kecamatan Karanggayam.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun ciri-ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Marthalina, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu

2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki sebuah fenomena sosial. Penelitian kualitatif menurut Yatim Riyanto (2008:15) (syandrawati, 2016) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif diperoleh dalam setting alami, (2) Peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data dan menginterpretasikan, (3) Mayoritas penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam rangka memahami dan menggambarkan semua gejala yang berkaitan dalam setting yang diteliti, (4) Menganalisis dengan pendekatan induktif, terutama pada waktu awal penelitian tersebut dilakukan, (5) dalam penelitian kualitatif proses merupakan hal penting, bukan hasil semata, (6) Peneliti lebih menaruh perhatian pada permasalahan penting yang di lihat dari kacamata orang yang diteliti, dan makna merupakan hal esensial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan tahapan apa saja yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan perempuan. Tulisan ini mengambil kasus pada Kelompok Wanita Tani "Tela Mandiri" desa Giritirto Kec. Karanggayam. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif yang akan mendeskripsikan data dan informasi yang diberikan dari informan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Adapun informan antara lain pengurus KWT, anggota kelompok KWT, Kepala Desa, Ketua PKK, dan Pendamping Kegiatan. Selain itu, observasi dilaksanakan selama proses pendampingan berlangsung. Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber untuk mengetahui strategi dan tahapan pemberdayaan kelompok wanita tani 'Tela Mandiri' Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi

Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam memiliki luas mencapai 15,28 km². Wilayah ini sangat bergantung pada sektor pertanian. Produk pertanian yang dihasilkan antara lain pisang, kopi dan singkong. Penduduk desa Giritirto telah mendapatkan pelatihan pengolahan pisang dan telah terdapat UMKM kopi yang telah mandiri. Potensi singkong belum dioptimalkan pengolahannya oleh masyarakat setempat. Selama ini singkong yang dipanen dijual tanpa diolah sehingga nilai tukar petani singkong di desa Giritirto sangat rendah. Tidak dimilikinya ketrampilan untuk mengolah singkong menjadi produk dengan nilai tambah menjadi faktor yang mengakibatkan nilai tambah dari singkong dimanfaatkan oleh industri pangan lain seperti lanting. Selain dijual sebagai bahan baku lanting, singkong diolah secara sederhana sebagai gaplek atau oyek yang dapat digunakan sebagai pengganti beras untuk konsumsi harian keluarga di desa Giritirto Kecamatan Karanggayam.

Strategi dan Tahap Pemberdayaan

Arifin (2003) menyatakan bahwa peran wanita dalam pertanian merupakan salah satu strategi pemerataan dalam pembangunan pertanian. Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu wadah bagi petani dimana para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang bergerak dalam kegiatan pertanian. KWT berbeda dengan kelompok tani yang lainnya, dalam pembinaannya KWT diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil- hasil pertanian maupun perikanan. Selain itu, KWT juga diharapkan agar dapat berperan pada pemberdayaan ekonomi dengan cara mendorongnya untuk dapat mencapai kemandirian ekonomi.

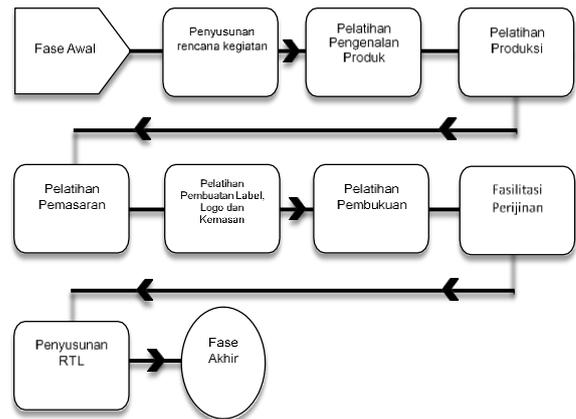
Sektor pertanian terpilih menjadi alternatif mengatasi masalah perekonomian selain mengingat sektor ini merupakan sektor dominan di Kabupaten Kebumen yaitu karena sektor ini cukup resilience di tengah pandemic Covid-19. Pengolahan hasil pertanian agar mendapatkan nilai tambah ekonomi menjadi pilihan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pelatihan dan

pendampingan partisipatif dipilih sebagai strategi pemberdayaan kelompok “Tela Mandiri”.

Proses pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan diberikan dalam rangka proses pembelajaran, memberikan peluang, motivasi, memberikan kekuatan dan kepercayaan diri anggota kelompok untuk terus berkreaitivitas. Selain itu untuk mendorong anggota kelompok untuk memiliki kepercayaan diri untuk membangun jejaring dan meningkatkan kemampuan marketing, skill dalam pengolahan produk dan berkreasi dengan temuan-temuan produk baru untuk pengembangan kelompoknya. Pemberdayaan dilakukan kepada kelompok Tela Mandiri yang beranggotakan 20 orang perempuan yang berlatar belakang petani dan ibu rumah tangga. Sebagian besar anggota merupakan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki ketrampilan mengolah singkong selain menjadi gapek dan oyek.

Secara umum kendala yang dihadapi oleh kelompok wanita “Tela Mandiri” adalah akses permodalan, pengembangan jaringan usaha, minimnya pengembangan jaringan usaha, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan merintis usaha dan manajemen pengelolaan keuangan. Proses pelatihan dan pendampingan ini mampu mengubah paradigma bahwa merintis usaha mikro memang tidak mudah, namun ketika ada kemauan dan menambah kepercayaan diri untuk mencoba serta trust, gotong royong dan saling membantu dapat mewujudkan sinergi kelompok. Pada akhirnya masing-masing saling menguatkan peran dalam kelompok untuk meningkatkan usahanya.

Pelatihan dan Pendampingan dilaksanakan selama dua bulan berturut-turut termasuk proses evaluasi produksi dan pemasaran. Kelompok Tela Mandiri memiliki etos kerja yang tinggi dan sebagian mulai percaya diri dalam melakukan produksi dan pemasaran. Adapun pelatihan dan pendampingan yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Pendampingan

Adapun pelaksanaan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan rencana kegiatan	September
2	Pelatihan pengenalan produk	September
3	Pelatihan produksi tepung moca	September
4	Pelatihan Produksi Olahan Singkong	September
5	Pelatihan pemasaran	September
6	Pelatihan desain label, dan kemasan	September
7	Pelatihan dan Pendampingan pembukuan sederhana	September
8	Fasilitasi perizinan usaha dan produk	September
9	Penyuluhan Keamanan Pangan	September
10	Pendampingan dan evaluasi produksi dan penyusunan rencana tindak lanjut	Oktober

Terdapat empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut (Wilson, 1996 dalam Dwiyanto, 2013):

1. **Penyadaran Kemampuan**
 Pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Pada tahapan ini kelompok Tela Mandiri diberikan penyadaran akan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki dan rencana yang akan disusun selama dan setelah

selesai pelatihan. Anggota kelompok diberikan kesadaran dan diajak untuk mengembangkan skill nya dengan memberikan contoh berhasil pada produk sejenis sebagai referensi. Proses ini untuk menyadarkan anggota kelompok akan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan anggota kelompok.

2. Pemahaman

Lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Pada tahap ini Kelompok Tela Mandiri diberikan pelatihan pengembangan produk olahan singkong. Kelompok diberikan kebebasan untuk memutuskan jenis produk mana yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi pasar yang ada. Pada akhirnya kelompok memutuskan untuk memproduksi semua produk yang diajarkan sembari mendapatkan pola produk mana yang menjadi favorit dari konsumen.

3. Pemanfaatan

Setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Pada tahap ini kelompok Tela Mandiri diberikan pendampingan dalam hal pemasaran sembari meningkatkan skill pemasaran anggota kelompok. Kelompok dilatih dengan target tertentu yang akan dicapai. Pada setiap minggu akan dilaksanakan evaluasi terhadap hasil penjualan yang telah dilaksanakan. Target yang dipasang sebesar 35 pak setiap minggu sehingga pada akhir tahap evaluasi pada minggu ke 4 penjualan ditargetkan mencapai 140 pak. Berdasarkan hasil evaluasi selama dua minggu yaitu pada awal hingga pertengahan oktober telah mampu menjual 140 pak produk. Hingga akhir pelatihan pada akhir Oktober total penjualan yang berhasil dicapai oleh kelompok adalah sebanyak 357 pak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penjualan

No	Jenis Barang	Jumlah Penjualan
1	Nastar Mocaf	68
2	Eggroll oyek	97
3	Sagon oyek	86
4	Tepung Mocaf	68
5	Brownies	29
6	Tepung Oyek	9

Berdasarkan data penjualan tersebut hasil dari pelatihan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dan layak untuk dilanjutkan. Selain pelatihan skill pengolahan produk dan pemasaran juga dilatih mengenai pembukuan sederhana dan hasilnya pada akhir pelatihan sudah dapat melakukan pembukuan dengan rapi.

4. Penggunaan

Menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam fase ini masyarakat yang sudah berhasil mencapai target yang diberikan oleh komunitas, akan semakin gencar dalam mencapai target-target selanjutnya sehingga berbagai hasil pelatihan yang sudah diberikan sudah diterapkan dalam keseharian masyarakat.

Proses pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan diberikan dalam rangka proses pembelajaran, memberikan peluang, motivasi, memberikan kekuatan dan kepercayaan diri anggota kelompok untuk terus berkreativitas. Selain itu untuk mendorong anggota kelompok untuk memiliki kepercayaan diri untuk membangun jejaring dan meningkatkan kemampuan marketing, skill dalam pengolahan produk dan berkreasi dengan temuan-temuan produk baru untuk pengembangan kelompoknya.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan ekonomi terhadap kelompok wanita tani "Tela Mandiri" adalah sebagai berikut:

1. *Welfare*

Program ini telah mampu menggugah kelompok perempuan dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini terbukti dari komitmen dan hasil

evaluasi yang menunjukkan eksistensi kelompok dan kemauan untuk berkembang.

2. Akses

Kemampuan akses para perempuan anggota kelompok terbatas pada akses pelatihan, pembinaan dan pemasaran. Untuk akses teknologi informasi masih terbatas. Terkait dengan akses pembiayaan belum dilakukan oleh anggota kelompok karena masih fokus pada pengembangan usaha terlebih dahulu.

3. *Consientisation*

Pemahaman atas perbedaan jenis kelamin dan gender masih rendah, rumah tangga masih menjadi tanggung jawab perempuan sepenuhnya.

4. Partisipasi

Partisipasi dan pengambilan keputusan sudah dapat dilakukan dalam kelompoknya, namun belum pada pengambilan keputusan strategis dalam tingkat di atasnya misalnya dalam tataran kebijakan pemerintah desa.

5. *Equality of Control*

Dalam hal ini kelompok belum memiliki *bargaining power* yang kuat dalam kekuasaan atas faktor produksi dan pembagian keuntungan. Sebagian masih membutuhkan nasihat dari luar kelompoknya.

Pada dasarnya pemberdayaan harus menempatkan masyarakat pada posisi terlibat sebagai subyek. Strategi pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan. Pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan pendapatan dilakukan dengan peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi atau kewirausahaan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal. Sesuai dengan unsur pemberdayaan ekonomi selain partisipasi adalah akses. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan akses berbagai sumber daya baik permodalan, bahan baku, teknologi dan pasar. Program pemberdayaan tidak dapat serta merta dapat mendorong kelompok menjadi mandiri, namun perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan menuju kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan usaha dengan pendampingan partisipatif untuk

mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya pemberdayaan adalah kegiatan usaha untuk lebih memampukan atau memberdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan kemampuan, kepercayaan diri, kewenangan, tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan partisipatif sebagai salah satu strategi pemberdayaan perempuan pada kelompok wanita tani "Tela Mandiri" dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga berbasiskan potensi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan kepada 20 anggota kelompok. Tahapan pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui pemberian kesadaran akan potensi dan kapasitasnya, memberikan pemahaman, melalui pelatihan dan pendampingan, dan pemanfaatan kapasitas serta pendamping, dan penerapan dalam keseharian untuk keberlanjutan kelompoknya dengan tujuan meningkatkan ketrampilan bagi kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu dilakukan pelatihan dan pendampingan pemasaran baik online maupun offline dan pembukuan untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha kelompok. Sejauh ini kelompok telah mampu melampaui target yang ditetapkan dan lebih jauh diharapkan mampu menjadi produk unggulan desa Giritirto dan sekaligus dapat mendukung program diversifikasi pangan dan pencegahan stunting melalui pangan olahan singkong.

Beberapa hal yang masih menjadi catatan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran masih belum mampu menjangkau pasar domestik sekitar, masih bertumpu pada pasar luar kota dengan jaringan terbatas pada saudara, relasi dan kenalan sehingga perlu diupayakan untuk memperluas jaringan pasar lokal termasuk sistem konsinyasi dengan toko modern
2. Kelemahan UMKM pemula adalah produk yang dihasilkan belum memiliki kualitas yang stabil. Quality kontrol perlu ditingkatkan oleh anggota kelompok.

3. Perlu peningkatan kesadaran membangun kelompok terlebih dahulu sebelum keuntungan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah Batool. 2020. *Women Empowerment in The Perspective of Socioeconomics Dynamics: A Case Study of Northern Punjab, Pakistan. Elementary Education Online Vol 19 (Issue 4) 4846-4857*
- Batool, Hafsa. 2020, *Women Empowerment in the Perspective of Socioeconomics Dynamics: A Case Study of Northern Punjab, Pakistan. Iklogretim Online-Elementary Education Online, 2020; Vol 19 (Issue 4)*
- Dwiyanto Bambang Sugeng. Jemadi. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan: Universitas Proklamasi.*
- Evendi. Arviana.2020. *Peran Kelompok Wanita Tani dalam Perekonomian Masyarakat Desa Neglasari Kabupaten Bogor. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat. 2(2) 252-256*
- Khan, 2018. *Women Empowerment: Key to Socio-Economic Development. International Journal on Woman Empowerment. 5-7*
- Marthalina .2018. *Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. 3.1 (59-76)*
- Purnamasari, Vidya et.al. 2020. *Pemberdayaan Wanita Melalui Peluang Usaha dalam Peningkatan Ekonomi Lokal. Jurnal Graha Pengabdian, 2.(1) 1-8.*
- Purwaningsih. 2021. *Peran Perempuan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga Melalui Pengembangan Produk UMKM Produk Upcycle Selama Pandemi Covid 19. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi. 8.1 (455-466)*
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2014. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media.*
- Susilowati, Tutik. 2015. *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja. Jurnal Perempuan dan Anak 1(1) 1-11.*
- Syandrawati, Khun. 2016. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendampingan Pengolahan Jamur Toram dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di UKM Kampung Jamur Desa Wanungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoharjo.Skripsi. Universitas Negeri Surabaya*
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- BIODATA PENULIS : Jinggarani RD, lahir pada tanggal 20 Desember 1987 di Kabupaten Kebumen. Bekerja di Bidang Litbang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

**Pariwisata Kabumian
Mewujudkan Wisata Lestari Berbasis Potensi Lokal Kebumen**

**Kabumian Tourism
Realizing Local Potencial-Based Sustainable Tourism**

Sigit Tri Prabowo¹⁾, Kezia Kristananda²⁾

1) Biro Wisata dan Pengembangan Destinasi MILANGKORI

2) Jurusan Kajian Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Naskah Masuk: 25 November 2022 Naskah Revisi: 25 November 2022 Naskah Diterima: 29 Desember 2022

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang lengkap dan dapat dikembangkan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi lokal. Daya tarik wisata berbasis alam, budaya dan buatan dapat dan telah dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta maupun komunitas teritorial. Kenyataan di lapangan banyak inisiasi pengembangan wisata oleh desa dan komunitas yang gagal atau berhenti setelah berjalan beberapa saat. Penyebab utama kegagalan adalah konsep wisata yang dikembangkan tidak sesuai dengan kondisi lokal serta mengabaikan perkembangan trend pasar pariwisata. Konsep ekowisata yang sangat cocok dikembangkan oleh wisata berbasis komunitas justru diabaikan karena pesona wisata masal yang lebih cepat mendatangkan keuntungan. Kelemahan itu diperparah dengan perencanaan yang buruk, kapasitas sumber daya manusia yang tak memadai serta minimnya fasilitasi dan regulasi oleh pemerintah. Tulisan ini merupakan ulasan kritis berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemui oleh tim Milangkori Tour selama melaksanakan ekowisata di Kabupaten Kebumen.

ABSTRACT

Kebumen Regency has complete tourism potential and can be developed into one of the locomotives of local economic progress. Natural, cultural and artificial-based tourist attractions can and have been developed by the government, private sector and territorial communities. The reality on the ground is that many initiations of tourism development by villages and communities fail or stop after a while. The main cause of failure is that the tourism concept developed is not in accordance with local conditions and the tendency of potential market share. The concept of ecotourism that is very suitable to be developed by community-based tourism has been ignored because of the charm of mass tourism which is more profitable. This weakness is exacerbated by poor planning, inadequate human resource capacity and lack of facilitation and regulation by the government. This paper is a critical review based on field facts encountered by the Milannkori Tour team while carrying out ecotourism activities in Kebumen Regency.

PENDAHULUAN

Bagi para praktisi dunia pariwisata, Kebumen ibarat batu permata yang belum terasah namun mulai muncul celah-celah di permukaan dimana gemerlap batu mulia menyeruak keluar. Kebumen memiliki banyak keunggulan kompetitif. Keunggulan tersebut dapat didapat dari faktor geografis, budaya dan infrastruktur transportasi. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen 2017 - 2025 (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017), potensi geografis ini dipetakan ke dalam Kawasan Strategis Pengembangan Kepariwisata (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata (KPPK). Secara umum pemetaan yang dilakukan telah menunjukkan kesadaran keragaman potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Sekalipun belum terlalu jelas dibahas, aspek budaya sudah disadari sebagai salah satu potensi strategis pengembangan wisata Kebumen. Penetapan kawasan strategis Gombang dan Sempor yang berbasis budaya setidaknya menunjukkan adanya kesadaran awal meskipun sesungguhnya potensi budaya menyebar di kawasan yang jauh lebih luas. Dari segi infrastruktur transportasi juga cukup detail dijabarkan arah pembangunan aspek transportasi, baik dari kabupaten, di dalam kabupaten maupun di dalam lokasi destinasi. Namun mengingat RIPP KAB merupakan dokumen jangka panjang, maka beberapa perkembangan infrastruktur terbaru belum cukup mendapat ruang. Perlu kecermatan dalam tahap implementasi agar arah rencana induk tetap sederap dengan perkembangan teknologi dan fasilitas transportasi.

Pengembangan pariwisata di Kebumen masih jauh dari harapan yang termaktub dalam dokumen RIPP KAB. Amanah dan arah yang dirumuskan dalam RIPP KAB ternyata belum dapat mewujudkan dalam penerapannya di lapangan. Destinasi wisata yang dikelola pemerintah harus diakui sudah melewati masa puncaknya. Perkembangan pasar pariwisata yang semakin pesat akan semakin sulit diikuti

oleh destinasi ini mengingat beban prosedur birokrasi yang mesti dilewati untuk membuat setiap perubahan.

Sementara destinasi wisata non-pemerintah yang diklaim menyumbang cukup banyak wisatawan sebenarnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari 630.438 wisatawan pada tahun 2021, 484.455 orang (76%) berkunjung ke Pantai Menganti, 26.000 (4%) ke Jembangan Wisata Alam dan 20% sisanya dibagi lebih dari 30 destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kebumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum dapat berjalan baik. Berbagai inisiasi pengembangan destinasi wisata -- utamanya yang berbasis desa dan komunitas-- tidak dapat bertahan lama. Akibatnya sekian banyak dana desa dan dana swadaya terbuang percuma.

Artikel ini mengulas bagaimana konsep ekowisata dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Kebumen dalam pengembangan wisata berbasis komunitas/masyarakat (*community based tourism/CBT*). Juga akan dipaparkan bagaimana wisata massal (*mass tourism*) yang selama ini menjadi ikon pengembangan wisata (karena aliran uang yang mengalir deras) sebenarnya membawa potensi kerusakan lingkungan serta polusi sosial budaya.

Secara geografis Kebumen terletak di dataran rendah sepanjang pantai Samudera Hindia dengan perbatasan barisan perbukitan Serayu Selatan di sisi Utara. Hal ini memberikan kontur alam yang relatif lengkap, mulai dari kawasan pedesaan di tengah perbukitan yang mencapai ketinggian 500 MDPL hingga kawasan dataran pantai.

Begitupun pantai Kebumen memiliki dua zona yang sangat kontras dan menarik. Dari muara Sungai Cingcing Guling ke Timur hingga muara Sungai Wawar adalah kawasan pantai landai yang sering disebut sebagai Kawasan Urut Sewu. Di sini selain pesona pantai konvensional, juga dapat dijumpai wisata konservasi tukik,

agrowisata serta wisata jelajah dengan menggunakan kendaraan roda empat. Di sisi Barat, di kawasan antara Sungai Cingcing Guling dan Sungai Bodo/Ijo, terbentanglah deretan pantai karst dengan tebing-tebing curam yang eksotis. Potensi wisata tempat ini tak terbantahkan lagi dengan munculnya Menganti sebagai salah satu wisata unggulan, tak hanya di Kebumen bahkan di Jawa Tengah. Masih di kawasan Barat, perbukitan karst yang membujur dari pantai hingga perbukitan Serayu di Utara merupakan laboratorium alam yang sangat lengkap untuk wisata edukasi dan wisata alam. Di sini pula terletak ratusan gua karst, salah satunya adalah Gua Jatijajar, obyek wisata milik pemerintah yang paling banyak didatangi wisatawan. Mengingat pentingnya fungsi ekologis dari kawasan karst ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dengan penetapan ini diharapkan pemanfaatan kawasan akan mematuhi rambu-rambu perlindungan aset ekologis, historis dan edukasi.

Perbukitan Serayu Selatan di sepanjang sisi Utara didominasi oleh hutan pinus milik Perhutani yang di beberapa tempat dikembangkan oleh masyarakat desa sebagai destinasi wisata. Kebanyakan destinasi yang dikembangkan merupakan kombinasi antara pemandangan alam, keragaman tumbuhan serta obyek-obyek buatan seperti gardu pandang dan spot foto. Di kawasan Utara ini pula terdapat kawasan sangat penting dalam konteks ilmiah maupun wisata edukasi yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsembung. Kawasan yang memiliki keragaman geologi terlengkap di Asia Tenggara ini menjadi obyek studi lapangan para mahasiswa Geologi di Indonesia. Pada tahun 2019, berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Kebumen, KCAG Karangsembung dan KBAK Gombang Selatan ditetapkan sebagai Geopark Nasional Karangsembung – Karangbolong. Status ini semakin menambah amunisi pengembangan wisata di Kebumen, baik

dari sisi branding maupun diversifikasi produk wisata.

Sebelum terjadi Perang Jawa yang menandai mulainya era kolonial di Jawa, Kebumen masuk ke dalam wilayah *mancanegari kilen* (mancanegara Barat) bersama dengan Purworejo (Bagelen), Banyumas dan Cilacap. Berbeda dengan Banyumas yang di masa itu sudah memiliki fungsi strategis bagi Mataram, Kebumen masih merupakan *terra incognita*, daerah tak dikenal. Wilayah yang banyak bersentuhan dengan peradaban adalah kawasan Urut Sewu. Di sanalah terbentang jalan raya yang digunakan para bangsawan Banyumas ketika menghadap raja Mataram.

Sebagai jalur lintas utama, tak heran kebudayaan yang berkembang di kawasan Selatan sangat terpengaruh oleh budaya-budaya yang dibawa oleh pihak keraton. Suburnya bentuk-bentuk kesenian khas keraton Mataram seperti wayang kulit, wayang orang, karawitan dan kethoprak menunjukkan kuatnya pengaruh budaya keraton di wilayah itu. Sementara dari sisi kebahasaan, penduduk kawasan Kebumen Timur (Prebun dan sekitarnya) merupakan pengguna sub dialek Kedu yang jauh berbeda dengan dialek Banyumasan yang ada di Barat.

Pada masa itu, kawasan Utara masih terisolasi. Orang luar yang datang ke sana kebanyakan para ulama yang melakukan syiar agama atau justru tokoh-tokoh politik yang tengah berkonflik atau hendak mengasingkan diri. Ditelisik dari dialek dan sub dialek, kawasan Barat sangat dipengaruhi oleh Bahasa Banyumasan (*ngapak*). Sementara itu, kawasan karst serta lereng Barat merupakan wilayah Kebumen yang sangat dipengaruhi budaya Pasir Luhur yang mencakup kawasan Banyumas dan Cilacap. Hidupnya legenda Lutung Kasarung di kawasan karst menjadi bukti kuatnya pengaruh Pasir Luhur pada kebudayaan setempat. Pertemuan arus-arus kebudayaan di Kebumen ini memunculkan berbagai produk budaya yang beragam pula: kesenian, kerajinan, pola hidup dan lain-lain. Kondisi ini potensial menciptakan konten wisata budaya yang beragam pula.

Sebuah keuntungan yang tidak dimiliki setiap daerah.

Para penggemar film animasi pasti tak asing dengan *Cars*, film yang menceritakan kehidupan di kota kecil bernama Radiator Springs. Kota ini terletak di jalan Route 66 yang semula adalah jalur perdagangan ramai di Amerika. Pertumbuhan jalan tol serta berbagai jalan pintas antar kota menyebabkan Route 66 ditinggalkan para pengguna yang berakibat matinya kota Radiator Springs.

Pembangunan jalan tol yang masif di sisi Utara Jawa serta rencana pembangunan jalur Cilacap Yogyakarta membawa ancaman pada Kabupaten Kebumen. Jika tak cukup siap menyiapkan langkah tepat, bukan tak mungkin Kebumen akan senasib dengan Radiator Spring. Tanda-tanda ini setidaknya sudah tampak ketika Tol Cipali mulai beroperasi di bulan Juni 2021. Rumah makan dan area istirahat yang mengandalkan rombongan bus wisatawan mengalami penurunan omset hingga 50% (wawancara dengan pengusaha rumah makan di Gombang dan Karanganyar).

Namun selain sisi negatif, ada pula sisi positif dari pengembangan infrastruktur transportasi. Pemandangan penerbangan domestik dan internasional dari lapangan terbang Adi Sucipto Yogyakarta ke Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo memberikan peluang emas. Jarak tempuh dari airport ke pusat kota Kebumen hanya memakan waktu satu jam. Ini tentu sangat memudahkan para wisatawan dan pejalan yang menggunakan moda transportasi udara. Pengembangan Lapangan Terbang Jenderal Soedirman di Purbalingga semestinya dicermati sebagai peluang lain. Peluang lain yang sangat signifikan adalah dibangunnya jaringan rel jalur ganda oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Jalur pengembangan jalan tol yang tidak terlalu suportif untuk Kebumen membuat kereta api menjadi moda andalan dalam menggenjot kedatangan wisatawan.

Berkurangnya pembatasan perjalanan juga menunjukkan kenaikan jumlah pengguna

moda kereta api. Catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, jumlah penumpang penerbangan domestik pada bulan Januari 2002 sebesar 3,9 juta orang sementara pengguna kereta api pada periode yang sama sebesar 17,7 orang. Sekalipun data tersebut tidak menunjukkan berapa jumlah wisatawan namun setidaknya memperlihatkan perbandingan potensi pesawat terbang dengan kereta api sebagai pilihan moda transportasi.

Masih terkait dengan moda kereta api, Kebumen memiliki keunggulan kompetitif terkait jarak tempuh dari Jakarta. Data yang dirilis Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa Jabodetabek menduduki peringkat empat penyumbang wisatawan ke kota itu. Kebumen yang dapat ditempuh selama enam jam menggunakan kereta api menjadi pilihan idel dibandingkan dengan Jakarta - Jogja yang harus ditempuh tujuh sampai delapan jam. Karena itulah lepas dari pembangunan tol yang terkesan melompati Kebumen, moda kereta api dan penerbangan domestik mesti dipandang sebagai faktor peluang bagi pengembangan pariwisata Kebumen.

Berbagai keunggulan geografis, budaya dan infrastruktur transportasi menegaskan potensi terpendam yang dimiliki Kebumen. Meminjam istilah dunia batu akik yang sempat *booming* beberapa waktu lalu, Kebumen adalah bongkahan batu badar besi yang menunggu diasah agar tampil cantik dan bernilai tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekowisata: Peluang, Tantangan Dan Arti Pentingnya

Gagasan tentang ekowisata pertama kali muncul di awal 1970an ketika para ahli lingkungan dan pelaku wisata mulai melihat efek negatif dari kegiatan wisata yang dilakukan secara massal. Muncul kegelisahan untuk menimbang kembali kemanfaatan pariwisata, tidak hanya terkait akses lingkungan namun juga tingkat manfaat yang dapat dipetik oleh masyarakat lokal.

Namun baru di era 1990an, konsep dan istilah *ecotourism* (ekowisata) dikaji secara serius oleh pada akademisi. Sekurang-kurangnya ada tiga pengertian ekowisata yang dirumuskan dalam konteks perjalanan ke kawasan alami seperti dirangkum oleh Drumm dan Moore (2005:15) dan Wood (2002: 9), sebagai berikut:

1. Definisi yang pertama kali diterima secara luas adalah definisi yang diberikan oleh The International Ecotourism Society pada tahun 1990, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alami untuk mengkonservasi lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal"
2. Martha Honey pada tahun 1999 juga mengusulkan pengertian yang lebih detail, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan ke kawasan rentan, belum terjamah, dan dilindungi namun berdampak rendah dan skala kecil. Ekowisata mendidik wisatawan, menyediakan dana untuk konservasi, memberikan manfaat langsung bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan mengedepankan respek terhadap perbedaan budaya dan hak azasi manusia"
3. Lembaga Konservasi Alam Dunia IUCN pada tahun 1996 memberikan pengertian yang diadopsi oleh banyak organisasi, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara lingkungan dan kunjungan ke Kawasan alami, dalam rangka menikmati dan menghargai alam (serta semua ciri-ciri budaya masa lalu dan masa kini) untuk mempromosikan konservasi, memiliki dampak kecil dan mendorong pelibatan sosial ekonomi masyarakat lokal secara aktif sebagai penerima manfaat"

Setidaknya ada delapan puluh definisi tentang ekowisata yang dilontarkan. Di Indonesia sendiri, pengertian ekowisata dapat dilihat dalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu "Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi

sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal".

Berbagai definisi di atas mesti dikaitkan juga dengan definisi obyek atau daya tarik wisata. Setelah berlakunya undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, istilah objek wisata diganti menjadi daya tarik wisata yang memiliki definisi segala sesuatu keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari berbagai definisi tersebut, muncul beberapa kata kunci yang dapat dipandang sebagai karakter ekowisata, yaitu: alam, budaya, konservasi, pemberdayaan, masyarakat lokal, kesejahteraan. Kata-kata kunci ini menjadi penting untuk melihat ulang berbagai kegiatan wisata yang terkait dengan alam apakah dapat disebut sebagai ekowisata. Lintas alam menggunakan sepeda motor trail misalnya. Jika dalam pelaksanaannya mengabaikan unsur pelestarian alam, tidak melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal serta tidak memberi manfaat apapun kepada masyarakat dan wilayah yang ditempati, maka kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai ekowisata.

Peluang Pasar Ekowisata

Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir selama dua tahun secara masif memporakporandakan industri pariwisata dunia tak terkecuali Indonesia. Hampir semua lini industri pariwisata lumpuh. Sebuah peristiwa global yang menyadarkan kita semua betapa rapuhnya industri pariwisata kita, betapa mudah berubahnya pasar pariwisata. Bagaimanapun, bencana pandemi tersebut juga membawa berbagai hikmah. Salah satunya adalah arti pentingnya wisatawan nusantara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dokumen Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022, pergerakan wisatawan nusantara pada tahun 2020 diukur dengan metode terbaru *Mobile Positioning Data* (MPD) sebesar 518,6 juta. Sementara tahun 2021

diestimasikan mencapai 569 juta orang. Kondisi ini didukung dengan peningkatan tren mobilitas penduduk di tempat perdagangan retail & rekreasi dari Oktober hingga Desember 2021.

Meningkatnya jumlah wisnus berdampak besar terhadap okupansi hotel di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, okupansi hotel mengalami tren positif, dari 30,35% pada bulan Januari hingga 51,57% di bulan Desember 2021. Pemulihan terjadi pada industri perhotelan, jika dibandingkan Desember tahun 2020 yang hanya mencapai 40,14%. Bisa dibilang, tren ini terjadi hampir di seluruh Daerah Super Prioritas (DSP) dan Daerah Pariwisata Prioritas (DPP), kecuali Bali yang masih berkontraksi sebesar -16,8%.

Dalam konteks Kebumen dengan segala potensi yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya, wisatawan nusantara adalah pangsa pasar yang paling potensial dan paling realistis untuk digarap. Dari sisi pasar produk pariwisata, secara global pertumbuhan pasar ekowisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan wisata konvensional beberapa tahun terakhir. Selain dari sisi permintaan, terlihat juga sisi penawaran yang meningkat karena fenomena sosial dan ekonomi yang menarik dalam pasar ekowisata. Hal ini karena potensi ekowisata bisa dikelola dari semua objek (alam, budaya, buatan) dan semua potensi itu bisa direkayasa agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan. (Mochammad Nafia, 2017).

Berdasarkan analisis *The International Ecotourism Society* 2000 pertumbuhan pasar ekowisata berkisar antara 10-30 persen pertahun sedangkan pertumbuhan wisatawan secara keseluruhan hanya 4 persen. Tahun 1998 WTO memperkirakan pertumbuhan ekowisata sekitar 20 persen. Di Indonesia diperkirakan sekitar 25 persen wisatawan mancanegara pada tahun 1996 merupakan ekowisatawan *ecotourist*. Statistik ini menunjukkan bahwa perilaku pasar pariwisata sedang berlangsung saat ini dan ekowisata akan menjadi pasar wisata yang sangat prospektif di masa depan. Perkembangan pasar ekowisata diperkirakan akan semakin melonjak pascapandemi. Hal ini disebabkan kecenderungan pasar yang menjadi sangat memperhatikan faktor kesehatan

(higienitas), alam terbuka, menghindari kerumunan dan mengurangi pergerakan (*staycation*). Kecenderungan-kecenderungan ini adalah karakter dan keunggulan yang dimiliki oleh ekowisata.

Tantangan Ekowisata

Sekalipun ekowisata secara masif sudah diperkenalkan sejak dekade 1990an, tidak serta merta produk ini berkembang dan diterima para pelaku industri pariwisata. Alih-alih menggeser posisi wisata massal, pemahaman serta kesadaran atas arti penting ekowisata masih jauh dari benak para pelaku industri pariwisata. Kebijakan pemerintah serta cara pandang banyak pihak yang melihat pariwisata sebagai cara mudah mendapatkan uang menghasilkan konsep-konsep pariwisata yang didasarkan pada keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendek. Berbagai prinsip pengembangan wisata berkelanjutan yang bertebaran di undang-undang, dokumen rencana pengembangan pariwisata dan lain-lain menjadi tumpul ketika dihadapkan dengan target-target yang sangat kuantitatif.

Di tingkat kabupaten kota bahkan kemajuan pariwisata sangat sering diukur semata-mata dari angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat. Tuntutan ini menyebabkan banyak pemerintah daerah yang sebenarnya dalam amanah Undang Undang Pariwisata ditetapkan sebagai regulator dan fasilitator industri pariwisata akhirnya terjebak menjadi operator destinasi wisata yang harus menjual tiket masuk sebanyak-banyaknya.

Sekalipun aspek ekonomi dan kesejahteraan merupakan unsur wajib dalam pengembangan ekowisata, jumlah yang diraih dan laju peningkatan neraca laba tidak akan pernah bisa menyamai kucuran laba dari bentuk-bentuk wisata massal. Target ekonomi jangka pendek ini akhirnya membuat ekowisata tak lagi menjadi pilihan ideal, bahkan di tempat-tempat yang mengunggulkan potensi alam dan budaya sebagai daya tariknya. Kondisi ini juga menjadikan ekowisata menjadi tak cukup menarik bagi investor konvensional. Keuntungan finansial yang cenderung lambat serta tuntutan proses jangka panjang membuat

ekowisata bukan pilihan investasi yang menggiurkan.

Arti Penting Ekowisata

Selain karena trend pasar pariwisata yang semakin berpihak pada ekowisata, ada isu-isu lain yang semakin menegaskan arti penting pengembangan produk wisata jenis ini. Secara ekologis, ekowisata menjadi pilihan tak terbantahkan untuk membendung rusaknya atau berkurangnya kualitas lingkungan sebagai dampak kegiatan pariwisata. Dari kedua sisi (pasar dan konsumen), ekowisata menuntut komitmen yang sama besarnya terhadap pelestarian alam. Konsep pariwisata lestari (*sustainable tourism*) adalah panduan bagi para pelaku industri wisata untuk mewujudkan praktek-praktek pariwisata berwawasan lingkungan. Sementara wisata bertanggungjawab (*responsible tourism*) adalah panduan bagi para wisatawan untuk berperilaku sesuai dengan kaidah pelestarian alam.

Dari sisi kemanfaatan ekonomis, ekowisata menjamin keadilan distribusi manfaat dan pendapatan. Pemusatan keuntungan pada investor atau sekelompok kecil masyarakat tidak akan terjadi manakala kaidah ekowisata diterapkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi berkala.

Ekowisata juga menjadi pilihan untuk menghindari terjadinya benturan budaya lokal dengan berbagai bentuk budaya yang dibawa wisatawan. Pilar penghormatan terhadap keragaman budaya dan hak asasi manusia akan memunculkan interaksi budaya yang konstruktif dan saling memperkaya secara positif.

Bentuk-bentuk ekowisata yang mengoptimalkan potensi lokal dan tidak padat investasi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Dengan pendampingan peningkatan kapasitas yang tepat, masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokalnya akan menjadi perencana dan pengelola ekowisata yang handal.

PEMBAHASAN

Wisata Kabumian: Lokomotif Pertumbuhan

Berbagai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa (potensi) pendapatan pariwisata Kebumen justru didominasi oleh wisata-wisata yang dikelola masyarakat / CBT (*community based tourism*). Hal ini dapat dipahami karena jumlah destinasi CBT jauh lebih banyak daripada sembilan destinasi yang dikelola pemerintah daerah. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa saat ini ada dua puluh satu desa wisata di Kebumen. Banyak di antaranya yang mengelola lebih dari satu destinasi, bahkan hingga lima lokasi dalam satu desa.

Selain itu, wisata berbasis masyarakat relatif lebih adaptif terhadap perkembangan permintaan pasar sehingga lebih menarik bagi wisatawan. Bupati Kebumen sendiri sudah melihat peluang besar pengembangan pariwisata di Kebumen. Visi Misi Bupati yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menempatkan pariwisata sebagai sektor lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

Wajah Suram di Lapangan

Meski demikian harus diakui kenyataan di lapangan masih jauh dari yang diidamkan. Dari dua puluh empat desa wisata, baru lima desa yang dikategorikan maju. Sisanya adalah desa wisata berkembang (empat belas desa) dan rintisan (dua desa).

Kenyataan di lapangan semakin menyedihkan. Sebagian besar destinasi yang dikembangkan oleh masyarakat (baik desa, komunitas maupun lembaga lain) tidak mampu berkembang dengan baik. Beberapa bahkan gulung tikar dalam hitungan tahun atau bulan. Sayangnya pendataan dan evaluasi yang sah atas fenomena ini belum dilakukan sehingga sulit untuk mendapatkan data-data tertulis.

Hingga saat ini pendapatan dari sektor pariwisata CBT di Kebumen masih dikuasai oleh Pantai Menganti. Data dari Perhutani mengungkapkan bahwa di tahun 2021, Pantai Menganti menyedot 115 ribu pengunjung. Jumlah ini menempatkannya di peringkat ketiga setelah Kota Lama Semarang dan Candi Borobudur. Di sisi lain, banyak destinasi CBT

yang hanya meraih belasan ribu bahkan ratusan pengunjung dalam setahun. Data statistik ini tentu berbanding lurus dengan jumlah rupiah yang mengalir. Menjadi sebuah fakta tak terbantahkan di mata masyarakat bahwa wisata Menganti (yang dikonsepsi wisata massal) lebih ampuh mendatangkan rupiah daripada ekowisata.

Ekowisata untuk Kebumen

Dengan pencapaian finansial Menganti yang begitu cemerlang, menjadi tantangan ke depan untuk meyakinkan para pengelola destinasi CBT bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah pilihan terbaik untuk pengembangan wisata. Destinasi-destinasi berbasis jumlah pengunjung selalu membawa sisi gelap dalam pencapaiannya. Ketersediaan fasilitas yang memadai, air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya manajemen pengelolaan limbah yang baik sering menjadi tanggungjawab yang terabaikan.

Dengan keterbatasan kompetensi dan sumber daya, semestinya desa wisata memilih wisata skala kecil yang dampak lingkungannya dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Sekalipun penghasilan langsung (*direct income*) dari penjualan tiket tak spektakuler seperti wisata massal, manfaat tak langsung (*indirect income*) jauh lebih bisa dipetik dari ekowisata.

Potensi alam, budaya dan sosial yang begitu beragam harus dipetakan dan dilakukan pembobotan secara cermat untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula dengan keunggulan geografis sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan keseriusan dari tahap penilaian, perencanaan, implementasi hingga evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dan fasilitator pengembangan wisata daerah (sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) mesti dioptimalkan.

Mengingat beban administratif serta siklus pergantian personel yang cukup cepat di lingkungan birokrasi, perlu dibentuk sebuah badan yang lebih stabil dan mampu membuat perencanaan dan evaluasi pengembangan

pariwisata yang baik. Sudah saatnya pemerintah daerah mengulurkan tangan kepada pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam satu wadah yang bertugas merencanakan dan mengawal perkembangan pariwisata Kebumen. Tumbuhnya simpul-simpul pariwisata berbasis masyarakat yang sehat, ekologis serta dinamis mengikuti perkembangan pasar akan berujung pada perkembangan pariwisata yang berkeadilan serta berdaya ungkit bagi kemajuan Kebumen secara keseluruhan.

Meminjam jargon yang berkembang di masyarakat Kebumen, dapatlah gagasan ini diwadahi dalam nama Pariwisata Kabumian. Kata Kabumian yang berasal dari nama Pangeran Bumidirjo, tokoh sejarah Kebumen, mengandung nilai kearifan lokal. Kata kabumian juga memuat semangat membumi pada nilai dan kearifan lokal. Di samping itu, nama ini juga merujuk pada salah satu ikon Kebumen yaitu Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong yang tengah diajukan menjadi Global UNESCO Geopark.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pariwisata di Kebumen sudah saatnya mengadopsi konsep ekowisata. Pilihan ini akan memberi ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, memberi manfaat berkelanjutan (*sustainable benefit*) namun dengan eksekusi lingkungan yang minimal dan dapat dikelola oleh masyarakat dan komunitas. Pengembangan pariwisata yang kolaboratif akan menjamin terjaganya asas keadilan, kesetaraan dengan tetap memegang prinsip konservasi alam dan budaya serta penghormatan pada kearifan lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya bisa dipertimbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dibentuk sebuah badan perencanaan dan pengembangan destinasi yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan praktisi.
2. Dirumuskan metode pendampingan berkesinambungan yang tepat metode, tepat materi, tepat sasaran dan tepat capaian.
3. Dirumuskan panduan pengembangan ekowisata yang kontekstual berdasarkan potensi dan kondisi lokal Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhayu Rama, 2018, Peluang Ekowisata dalam Industri 4.0 di Indonesia, dalam JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019)
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kebumen, *Kebumen Dalam Angka 2022*, Kebumen, Badan Pusat Statistik
- Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2021, *Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Dowling RK dan Fennell DA. 2003. *The Context of Ecotourism Policy and Planning*. Di dalam: Fennel DA dan Dowling RK (editor). *Ecotourism Policy and Planning*. Cambridge. CABI Publishing.
- Ferdinal Asmin, 2017, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, -
- Kementerian Pariwisata, 2019, *Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Budaya*, Kemenpar
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021, *Outlook 2021/2022*, Kemenparekraf RI
- Sumber Wawancara :
1. Pengelola wisata Pantai Menganti Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen
 2. Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kabupaten Kebumen
 3. Pengelola Taman Pokdarwis Waduk Sempor, Sempor, Kebumen
- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Kebumen
- Biodata Penulis : Sigit Tri Prabowo¹⁾, Kezia Kristananda²⁾
- 1) Biro Wisata dan Pengembangan Destinasi MILANGKORI
 - 2) Jurusan Kajian Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada